

**SINERGISME KOMPONEN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DI KAWASAN PERDESAAN TELANG DAN BATU BETUMPANG**
*Synergism of Local Economic Development Components
for Increase in Social Welfare
at Telang and Batu Betumpang Rural Areas*

Sri Najiyati¹, Robert Arthur Simanjuntak² dan Nunung Nurwati³

¹Program Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial, Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Indonesia, Email: nadiati_2011@yahoo.com

²Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
Email: rob_7762@yahoo.co.id

³Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Pajajaran Bandung,
Email: nngnurwati@unpad.ac.id

Naskah diterima: 6 Mei 2015
Naskah direvisi: 18 Agustus 2015
Disetujui diterbitkan: 27 November 2015

Abstract

An increase in social welfare using developmental approach which is conducted through area-based Local Economic Development (LED) is believed to be one of the development strategies to reduce the possibility of distorted development occurrence at the rural areas since it is implemented synergistically involving the relationship among Government, "market", and the society. This study is to analyze the synergism of LED components, driving factors, and synergism obstacles, and further to formulate a model of LED component synergism for increasing social welfare at Telang (South Sumatera Province) and Batu Betumpang Areas (Bangka Belitung Province). Research method employed is deductive-qualitative approach with the type of explanatory research. The research uses some analytical techniques, namely four dimensions of synergism analysis, theory driven thematic analysis, and Problem Tree Analysis. Result of the study shows that collaboration of LED components at Telang Area is categorized into fragmented category, whereas at Batu Betumpang Area is categorized into the less synergetic one. The driving factors and main obstacles of LED synergism to create social welfare and to prevent the disembedded economy at the two areas are collaborative capability, leadership, regulations, collaborative planning, collaborative system, consensus on common goals, and legitimacy. These factors have become the triggers in arising other factors such as readiness, commitment, public participation, conflict of interest, motivation and communication.. Therefore, those seven triggering factors deserve to attain special attention to improve the synergism of LED to increase the social welfare and to prevent the disembedded economy.

Keywords: local economic development, rural area, synergism, social welfare

Abstrak

Peningkatan kesejahteraan sosial dengan pendekatan developmentalis yang dilaksanakan melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) berbasis kawasan, diyakini mampu sebagai salah satu strategi pembangunan untuk mengurangi terjadinya *distorted development* di kawasan perdesaan karena dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah, "pasar", dan masyarakat; serta ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi semua. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergisme komponen PEL dan menganalisis faktor pendorong dan kendala sinergisme komponen

PEL untuk peningkatan kesejahteraan sosial di Kawasan Telang (Provinsi Sumatera Selatan) dan Batu Betumpang (Provinsi Bangka). Metode penelitian menggunakan pendekatan deduktif-kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis empat dimensi sinergisme, *theory driven thematic analysis*, dan *Problem Tree Analysis (PTA)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi komponen PEL di Kawasan Telang termasuk dalam kategori terfragmentasi, sedangkan kolaborasi di Batu Betumpang termasuk dalam kategori kurang sinergis. Faktor pendorong dan kendala utama sinergisme PEL untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan mencegah terjadinya *disembedded economy* di kedua kawasan adalah kapabilitas kolaborasi, kepemimpinan, regulasi, perencanaan kolaboratif, sistem kolaborasi, konsensus tujuan bersama, dan legitimasi. Faktor-faktor tersebut memicu munculnya faktor-faktor lainnya seperti *readiness*, komitmen, partisipasi masyarakat, konflik kepentingan, motivasi, dan komunikasi. Oleh sebab itu, ketujuh faktor pemicu harus diperhatikan untuk peningkatan sinergisme PEL guna meningkatkan kesejahteraan sosial serta mencegah terjadinya *disembedded economy*.

Kata kunci: kesejahteraan sosial, pengembangan ekonomi lokal, perdesaan, sinergisme

Klasifikasi JEL: R58, I31

I. PENDAHULUAN

Penduduk desa belum memperoleh manfaat yang seimbang dalam proses pembangunan di Indonesia. Desa masih menjadi hunian bagi sekitar 63 % penduduk miskin negeri ini (Badan Pusat Statistik, 2014). Menurut Badan Pusat Statistik (2014), jumlah penduduk miskin Indonesia pada posisi September 2013 tercatat 28,55 juta atau 11,47% dari total penduduk di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 63% berada di perdesaan dan 37% berada di perkotaan, atau sekitar 17,9% penduduk desa adalah miskin dan 10,63 % penduduk kota adalah miskin. Menurut Nemes (2005. p.12) masyarakat perdesaan bersaing secara tidak sehat dan tidak adil dengan masyarakat perkotaan sebagai akibat aksesibilitas dan sumberdaya yang terbatas dan tidak seimbang seperti infrastruktur, sumber-sumber pembiayaan, kompetensi sumberdaya manusia, dan lain sebagainya. Mereka membutuhkan perlindungan dan dukungan Pemerintah dalam proses pembangunan. Dengan demikian, diperlukan strategi pembangunan yang dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan penduduk perdesaan.

Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai skema oleh berbagai sektor. Namun, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan di berbagai sektor tersebut kurang berkelanjutan atau kurang dapat mencapai sasaran, antara lain karena pada implementasinya bersifat sektoral, parsial, tumpang tindih, tidak memadai kebutuhan, atau tidak tepat sasaran (Darwis dan Rusastra 2011; Bahrein, 2010; Laksmono, 1999; Ashari, 2008; Bank Indonesia Makasar, 2006; Danarti, 2011; Erizal, 2008; Darmanto, 2011; Syukri, Mawardi, dan Akhmadi, 2011). Oleh karena itu, diperlukan konsep pembangunan yang sinergis sampai di tingkat implementasi untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat.

Tanpa sinergisme antar berbagai pelaku pembangunan, program pembangunan akan mengalami kegagalan (Nemes, 2005). Bryson, Crosby, & Stone (2006) menyatakan bahwa orang-orang yang ingin mengatasi masalah sosial yang sulit, sudah mulai menyadari bahwa berbagai komponen pembangunan yang bergerak di bidang bisnis, nonprofit, atau filantropi; harus saling bersinergi untuk menghadapi tantangan dan mencapai hasil yang efektif. Dalam kondisi ini, semakin ditemukan banyak pimpinan organisasi Pemerintah yang memfasilitasi dan beroperasi pada tataran multi-organisasi dalam rangka pengaturan jaringan dan memecahkan

masalah yang saling terkait dan tidak dapat diselesaikan dengan mudah oleh sektor tunggal (O'Leary et al., 2009).

Teori sinergisme mengatakan bahwa sinergisme antar entitas atau komponen akan memberikan hasil yang lebih baik dari pada sendiri-sendiri. Sinergisme dalam konteks manajemen pada dasarnya adalah kolaborasi atau kerjasama dua komponen atau lebih yang berkomitmen dan membentuk suatu sistem yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama; dan memberikan perubahan yang lebih baik atau berbeda dari efek masing-masing (disintesis dari pendapat Richard, 2007; Corning, 1998, Anderson & Carter, 1974; Andrushko, 2012; Corbin, Mittelmark, dan Lie, 2011; Lasker, Weiss, dan Miller, 2001; Carnwell dan Carson. 2005).

Sebagaimana sudah dikemukakan di atas bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan oleh Pemerintah tetapi hasilnya belum optimal. Menurut Midgley (1995, p. 3-4) kemiskinan merupakan salah satu akibat terjadinya *distorted development* yaitu fenomena pembangunan ekonomi yang tidak selaras dengan perkembangan sosial, karena terlalu mengejar pertumbuhan sehingga hasilnya tidak dapat dinikmati oleh kelompok yang kalah bersaing dan tertinggal. Akibatnya, pembangunan ekonomi cenderung menghasilkan “output kembar” yaitu pertumbuhan dan kemiskinan (Nugroho, Adam, Tjitroesmi, dan Aryo (2010). Oleh sebab itu, harus ada konsep pembangunan yang mampu mencegah terjadinya proses kesenjangan kesejahteraan yang makin melebar sebagai akibat dari pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan.

Untuk memecahkan masalah pembangunan yang terdistorsi, diperlukan pendekatan pembangunan ekonomi yang menjamin bahwa kesejahteraan sosial secara menyeluruh mendapat prioritas yang tinggi, melalui pendekatan developmentalis (Zastrow, 2010; Midgley, 1995; Adi, 2005). Pendekatan developmentalis dijabarkan lebih lanjut oleh Midgley (1995) dalam konsep *Social Development* yaitu sebuah proses perubahan sosial yang terencana untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan, dilaksanakan melalui penyesuaian dengan pembangunan ekonomi yang dinamis. Dengan pemahaman *social development* tersebut, maka pengentasan kemiskinan di perdesaan memerlukan antara lain pembangunan ekonomi yang dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh dalam *setting* spesifik lokasi, dan dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah, “pasar”, dan masyarakat.

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) atau *Local Economic Development (LED)* merupakan salah satu konsep pembangunan ekonomi yang sesuai dengan pendekatan *social development* yang digagas oleh Midgley (1995). PEL adalah proses pembangunan ekonomi berbasis kawasan/lokasi yang dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah, masyarakat, dan swasta (“pasar”) untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (disintesis dari Helmsing, 2001; Swinburn, Goga & Murphy, 2006, Blakely, 2010; The World Bank, 2011). Definisi PEL paradigma baru tersebut jelas merujuk bahwa kerjasama yang sinergis antara Pemerintah, masyarakat dan “Pasar”; menjadi kunci keberhasilan PEL. Beberapa hasil penelitian juga merekomendasikan agar ada upaya peningkatan keterpaduan, kolaborasi, koordinasi, atau partisipasi -sebagai bagian dari dimensi atau faktor sinergisme- ; guna menunjang keberhasilan PEL di beberapa negara (Beyer, Peterson & Sharma, 2003; Tello, 2010).

Pembangunan terpadu berbasis lokasi atau kawasan yang dirancang untuk mendorong terjadinya sinergisme sudah lama dikembangkan di Indonesia melalui berbagai skema. Diantaranya adalah Agropolitan, Minapolitan, Kawasan Sentra Produksi, dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (RPJMN 2010-2014), Kota Terpadu Mandiri (KTM), dan PEL;

yang diinisiasi oleh berbagai Kementerian dan Bappenas serta dilaksanakan oleh berbagai daerah. Namun demikian, hasil-hasil penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa program pembangunan berbasis kawasan tersebut secara umum belum memberikan hasil seperti yang diharapkan karena pada implementasinya, masih bersifat sektoral, tumpang tindih, dan atau kurang koordinasi (Suyatno, 2000; Najiyati dan Slamet, 2011; Yunelimeta, 2008; Darmanto, 2011, Jocom, 2006; Iqbal dan Anugrah, 2009; Erizal, 2008). Hal ini sesuai dengan pendapat O'Hara (2012) yang menyatakan bahwa ketiga komponen pembangunan ekonomi tidak selalu berjalan harmonis tetapi seringkali justru kontradiktif karena tujuan dan motifasi yang berbeda. Kontradiktif yang berlebihan akan menyebabkan dominasi satu komponen terhadap komponen lain sehingga menyebabkan adanya *disembedded economy*. Sebaliknya apabila terjadi keseimbangan distribusi nilai tambah pada masing-masing komponen; akan terjadi *embedded economy*.

Dengan kenyataan seperti tersebut di atas, terlihat bahwa prinsip sinergisme dalam pembangunan berbasis kawasan, baru menjadi kata klise yang belum terwujudkan. Diduga ada yang salah dalam implementasi konsep sinergisme dalam proses PEL berbasis kawasan di Indonesia atau dimungkinkan ada faktor-faktor lain yang belum diketahui dan ikut mempengaruhi proses sinergisme pembangunan di Indonesia. McGuire (2006, p. 33) mengatakan bahwa dalam konteks pembangunan, Pemerintah memang bukan entitas yang dapat memaksakan tindakan tetapi mereka merupakan kemudi dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Juga dikatakan bahwa walaupun dalam proses kolaborasi antar komponen pembangunan harus ada kesetaraan, namun bagaimanapun juga, Pemerintah pada akhirnya harus bertanggung jawab dalam pelayanan dan kepuasan publik. Dengan demikian, Pemerintah adalah komponen yang bertanggungjawab terhadap berlangsungnya proses kolaborasi sehingga menghasilkan sinergisme pembangunan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Sebagaimana telah disampaikan bahwa pendekatan developmentalis dengan konsep *social development* melalui PEL dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah, "pasar", dan masyarakat. Namun pembahasan, kajian, dan penelitian sinergisme PEL belum banyak dilakukan secara mendalam. Penelitian dan kajian sinergisme lebih banyak dikembangkan di bidang ilmu-ilmu biologi, kimia, farmasi, dan fisika (Corning, 1998). Sementara penelitian tentang sinergisme di bidang manajemen saat ini lebih banyak dilakukan dalam konteks hubungan personal, manajemen perusahaan, manajemen antar perusahaan, serta manajemen pembangunan antar sektor di bidang kesehatan (Lasker, Weiss, dan Miller, 2003; Corbin, Mittelmark, & Lie, 2011; Corwin, Corbin, & Mittelmark, 2012; Andrushko, 2012; Bryson, Crosby, & Stone, 2006; McGuire, 2006; Wanna, 2008, Benecke, Schurink, & Roodt, 2007). Oleh sebab itu, kajian tentang sinergisme komponen PEL untuk peningkatan kesejahteraan sosial dianggap penting dan menarik, serta masih terbuka banyak peluang untuk melakukan penelitian sinergisme dalam konteks kesejahteraan sosial melalui PEL terutama di Indonesia.

Kawasan Telang (terletak di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan) dan Batu Betumpang (terletak di Kabupaten Bangka Belitung) merupakan dua dari 44 lokasi PEL yang dikembangkan melalui skema Kota Terpadu Mandiri (KTM). Dari beberapa hasil evaluasi dan penelitian (Danarti dkk, 2012, Ditjen P2MKT, 2009, Najiyati dan Slamet, 2011, Haryadi dkk, 2012) menunjukkan bahwa PEL di kedua lokasi tersebut telah menunjukkan keberhasilan tetapi juga masih menghadapi berbagai permasalahan. Persentase keluarga miskin di kawasan ini cukup tinggi yaitu di Kawasan Telang 35,3% (BPS Kabupaten banyuasin, 2014) dan di Kawasan Batu

Betumpang 32,4% pada (BPS Kabupaten Bangka Selatan, 2013). Oleh sebab itu, sinergisme PEL di Kawasan Telang dan Batu Betumpang, penting untuk diteliti.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah disebutkan, penelitian Sinergisme Komponen Pengembangan Ekonomi Lokal ini bertujuan untuk: (1) menganalisis sinergisme komponen PEL serta (2) menganalisis faktor-faktor pendorong dan kendala sinergisme komponen PEL di Kawasan Telang dan Batu Betumpang untuk peningkatan kesejahteraan sosial. Penelitian ini merupakan bagian dari disertasi pada Program Doktor Ilmu Kesejahteraan Sosial, Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Indonesia.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat tiga alternatif pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yaitu residual, institusional, dan developmentalis (Zastrow, 2010; Midgley, 1995; Adi, 2005). Penelitian ini menggunakan pendekatan developmentalis dengan konsep *social development* sebagaimana digagas oleh (Midgley, 1995) karena lebih relevan dengan prinsip sinergisme, keadilan sosial, pengembangan ekonomi lokal, dan semangat gotong royong sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) atau *Local Economic Development* (LED) berbasis kawasan merupakan salah satu implementasi dari konsep *social development*. PEL paradigma baru dilaksanakan berbasis kawasan melalui kolaborasi Pemerintah, korporasi/Badan usaha/"pasar", dan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan seluruh warga (Helmsing, 2001; Rogerson, 2002; Swinburn, Goga & Murphy, 2006; Blakely, 2010).

O'Hara (2012 p.22) mengelompokkan komponen yang berperan dalam keberhasilan pengembangan ekonomi dalam empat unsur yang disebut sebagai *Quadratic Elements of Governance*. Komponen tersebut terdiri atas Pemerintah, masyarakat (individu) dan *civil society*, dan korporasi. Dalam penelitian ini, masyarakat dan *civil society* dikelompokkan menjadi satu sebagai komponen masyarakat. Oleh sebab itu, komponen PEL (lihat Gambar 2.1) meliputi : Pemerintah terdiri atas lintas instansi; masyarakat terdiri atas individu dan pelaku usaha mikro, buruh, dan organisasi masyarakat; dan organisasi non pemerintah termasuk badan usaha dan "pasar". Istilah "pasar" atau pelaku pasar di sini diartikan sebagai komponen pelaku usaha di bidang pembelian dan penjualan barang dan jasa yang dikontrol oleh *supply* dan *demand*.

Kolaborasi dalam konteks manajemen menurut Wanna (2008, p.3) dan Carnwell & Carson (2005, p.8) berarti kerjasama antara seseorang/organiasi dengan orang lain atau organisasi untuk mencapai tujuan atau usaha bersama. Mengacu pada pengertian tersebut, maka kolaborasi dalam penelitian ini secara lebih sederhana didefinisikan sebagai kerjasama dua komponen atau lebih yang berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama.

Sebagaimana disebutkan pada Bab Pendahuluan bahwa sinergisme adalah kolaborasi atau kerjasama dua komponen atau lebih yang berkomitmen dan membentuk suatu sistem yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama; dan memberikan perubahan yang lebih baik atau berbeda dari efek masing-masing. Definisi tersebut memperlihatkan posisi sinergisme terhadap kolaborasi di bidang manajemen; sinergisme merupakan bagian dari kolaborasi dan tidak semua kolaborasi adalah sinergisme. Hanya kolaborasi yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut sinergisme. Kolaborasi yang tersistem dan memberikan hasil yang lebih baik atau berbeda disebut sebagai sinergisme.

Mengacu pada konsep sinergisme tersebut di atas, maka ada empat dimensi yang harus dipenuhi untuk mencapai sinergisme komponen PEL yaitu dimensi proses kolaborasi, dimensi

sistem, tujuan bersama, dan dimensi efek (Gambar 2.1). Penjelasan dari masing-masing dimensi sebagai berikut: Dimensi sistem tercermin dari adanya model yang merepresentasikan sistem yaitu rangkaian komponen PEL yang terstruktur dalam klaster dan antar klaster komoditas yang saling bekerjasama secara teratur dari hulu ke hilir, untuk mencapai tujuan bersama (diadaptasi dari pendapat Middleton, 2011; Wiranto & Tarigan, 2002; Sugarmansyah, *dkk*, 2011; Custodio, 2003; Wanna, 2008; Carnwell & Carson, 2005; Payne, 2005; Corning, 1993).

Dimensi tujuan bersama tercermin dari adanya tujuan bersama yang disepakati, diinformasikan, dan dipahami oleh masing-masing komponen (Wanna, 2008 p.3; Carnwell dan Carson, nd, P.8). Dimensi proses kolaborasi antar entitas tercermin dari komitmen komponen dan partisipasi masyarakat. Komitmen merupakan kemampuan dan kemauan seseorang untuk menyelaraskan perilaku dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan kerjasama (Soekijan, 2009). Indikator partisipasi mengacu pada tangga partisipasi masyarakat yang digagas oleh Laris et al (2000) dalam Ife dan Tesoreiro (2008), tetapi tangga memiliki kontrol dan mendelegasikan dikategorikan dalam kelompok yang sama, sehingga dalam penelitian ini dibagi dalam enam tangga yaitu memiliki kontrol/mendelegasikan, merencanakan bersama, menasihati/mengusulkan, mengkonsultasikan, menerima informasi, dan nihil (tanpa partisipasi).

Dimensi efek pada kesejahteraan dapat dilihat dalam jangka pendek dan jangka panjang yang dicerminkan oleh perubahan output dan outcome sebagai berikut (diadaptasi dari Goldman, 2005; Rogerson, 2002; Swinburn, Goga dan Murphy, 2006 ; Scoones, 1998; DFID, 1999; Laksmono, 1999 ; Ribot dan Peluso (2003):

- a. *Output: livelihoos resource* meliputi peningkatan asset : modal natural, modal ekonomi atau keuangan, modal manusia, modal sosial, modal fisik.
- b. Output : Perkembangan usaha meliputi peningkatan produksi, omset penjualan, atau keuntungan; usaha baru atau kemudahan dalam memperoleh pekerjaan.
- c. *Livelihood Outcome*: terdiri atas peningkatan pendapatan dan penurunan biaya pemenuhan kebutuhan dasar.
- d. Keterjangkauan penduduk miskin: kemampuan penduduk miskin untuk mendapatkan manfaat dari program PEL.

Keempat dimensi tersebut di atas harus terpenuhi agar kolaborasi dapat disebut sebagai kolaborasi tingkat tinggi atau sinergisme (Tabel 2.1). Kolaborasi Pemerintah, badan usaha/"pasar", dan masyarakat dalam pengembangan PEL dapat mengalami kendala sehingga ada beberapa kemungkinan kategori yaitu mencapai sinergisme, terfragmentasi, additive, atau antagonis (diadaptasi dari pendapat Richard, 2007; Corbin, Mittelmark, dan Lie, 2011, Bryson, Crosby, & Stone, 2006, Reid & Smith, 2012. Apabila tidak ada kolaborasi disebut sektoral (Tarigan, 2004).

Kolaborasi yang tidak tersistem disebut terfragmentasi (Reid & Smith (2012) yang memberikan hasil sama saja disebut *additive* atau *integrity* (Richard (2007 p.12, Corbin, Mittelmark, & Lie (2011, p.2), yang memberikan hasil lebih buruk disebut antagonis (Corbin, Mittelmark, & Lie (2011, p.2). Kolaborasi tingkat tinggi yaitu yang tersistem dan memberikan hasil lebih baik disebut sinergisme (Richard, 2007 p.12; Corbin, Mittelmark, & Lie, 2011, p.2). Apabila tidak ada kolaborasi dalam pembangunan, disebut sektoral (Tarigan, 2004).

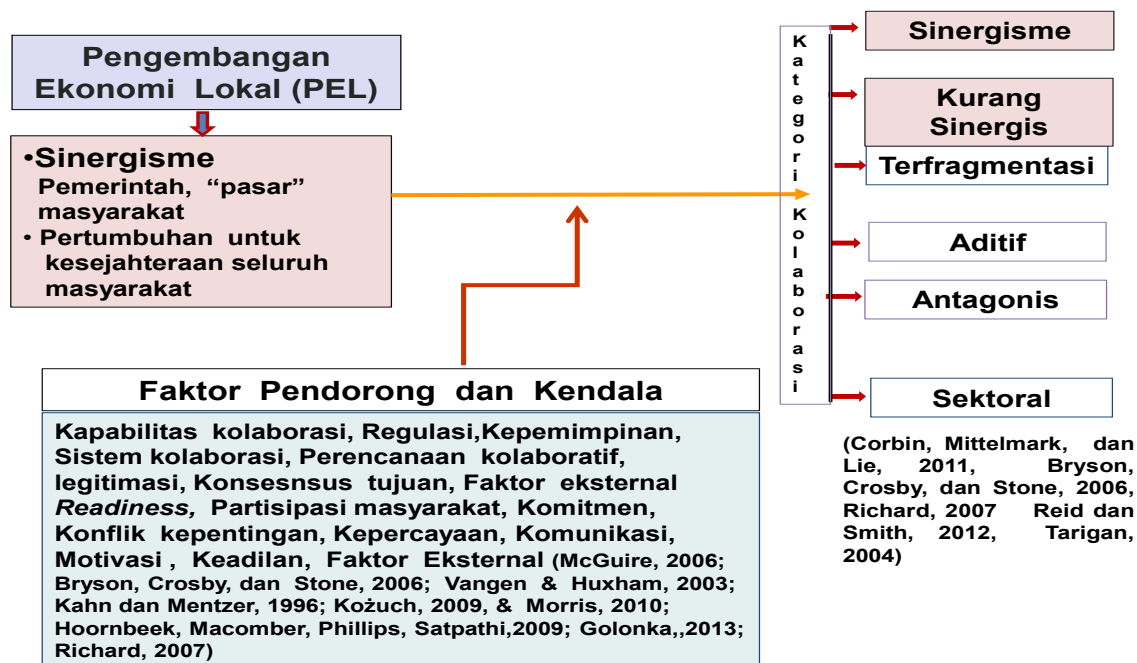
Preposisi penelitian ini mengacu pada pendapat McGuire (2006); Bryson, Crosby, dan Stone (2006); Vangen & Huxham (2003); Kahn dan Mentzerm (1996); Kozuch (2009), Morris (2010); Hoornbeek, Macomber, Phillips, Satpathi (2009); Golonka (2013); Richard, (2007) sebagai berikut: keberhasilan kolaborasi PEL mencapai kateori sinergisme dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang selama ini teridentifikasi sebagai faktor pendorong dan kendala kolaborasi

dalam berbagai konteks seperti manajemen perusahaan dan atau kolaborasi lintas sektor pada konteks pembangunan lainnya; yaitu perencanaan kolaboratif, kesepakatan, komunikasi, kepemimpinan, komitmen, partisipasi masyarakat, kepercayaan, legitimasi, konflik kepentingan, ketidaksiapan (*readiness*), kapabilitas kolaborasi, motivasi, sistem kolaborasi, tujuan bersama, keadilan, dan faktor eksternal (Gambar 2.1).

Tabel 2.1. Kategori Kolaborasi dan Kriteria Sinergisme Komponen PEL

No	Kategori Kolaborasi	Kriteria			
		Sistem	Tujuan bersama	Proses	Efek
1	Sinergisme	Tersistem dalam klaster secara komprehensif	Tujuan bersama disepakati dan dipahami oleh seluruh komponen	Komitemen seluruh komponen dan partisipasi masyarakat tinggi	Kesejahteraan (<i>Livelihoods resource</i> , kondisi usaha, <i>Livelihoods Outcome</i> , keterjangkauan) umumnya sangat meningkat secara optimal
2	Kurang sinergis	Sistem tidak koperhensif (Sebagian dibuat klaster tetapi klaster tidak tersistem secara jelas/tidak tertulis)	Tujuan bersama: disepakati oleh sebagian komponen, tetapi kurang mewadahi kepentingan bersama dan kurang dipahami oleh sebagian komponen	Komitmen dan partisipasi : bervariasi dari tinggi-kurang	Kesejahteraan meningkat tetapi kurang optimal dan atau tidak merata
3	Terfragmentasi	Tidak tersistem dan tidak terklaster	Ada tujuan tetapi tidak disepakati bersama dan atau sebagian besar komponen kurang memahami	Komitmen dan partisipasi : umumnya kurang	Kesejahteraan sebagian masyarakat meningkat tetapi tidak optimal dan tidak merata
4	Aditif (<i>terintegrasi</i>)	Tersistem atau terfragmentasi	Tujuan disepakati atau kurang	Komitmen-tinggi atau kurang	Kesejahteraan tidak mengalami perubahan
5	Antagonis	Tersistem atau terfragmentasi	Tujuan disepakati atau kurang	Komitmen-tinggi atau kurang	Kesejahteraan umumnya menurun
6	Sektoral	Tidak tersistem Tidak ada kolaborasi	Tidak ada tujuan bersama	Tidak ada komitmen berkolaborasi	-

Sumber : Diadaptasi dari pendapat Custodio (2003); Payne (2005); Wanna (2008); Carnwell & Carson (2005); Middleton (2011); Wiranto & Tarigan (2002); Sugarmansyah, dkk (2011); Laris et al (2000) dalam Ife & Tesoreiro (2008) ; Goldman (2005); Rogerson, 2002; Swinburn, Goga dan Murphy (2006); Djojodipuro (1994); Scoones (1998); DFID (1999); Laksmono (1999); Tarigan (2004); Bryson, Crosby, & Stone (2006); Richard (2007); Corbin, Mittelmark, & Lie, (2011); Reid & Smith (2012)



Sumber : Dianalisis dari McGuire, 2006; Bryson, Crosby, dan Stone, 2006; Vangen & Huxham, 2003; Kahn dan Mentzer, 1996; Kozuch, 2009; Morris, 2010; Hoornbeek, Macomber, Phillips, Satpathi, 2009; Golonka, 2013; Richard, 2007; Corbin, Mittelmark, dan Lie, 2011; Bryson, Crosby, dan Stone, 2006; Richard, 2007; Reid dan Smith, 2012; Tarigan, 2004

Gambar 2.1. Preposisi Faktor Pendorong dan Kendala Sinergisme

III. METODE PENELITIAN

Penelitian Sinergisme Komponen Pengembangan Ekonomi Lokal ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Bryman (2008, p.373) menyatakan bahwa umumnya penelitian kualitatif bersifat induktif, tetapi beberapa peneliti melakukan penelitian kualitatif untuk menguji teori, sehingga dalam penelitian kualitatif dimungkinkan bersifat deduktif dan tidak ada alasan mengapa penelitian kualitatif tidak dapat digunakan untuk menguji teori-teori yang ditentukan sebelum pengumpulan data. Hal tersebut senada dengan pendapat Batektine (2008), Silverman (2011), Creswell (2009). Menurut Creswell (2009 p. 93-98) ada empat tipe penelitian kualitatif menurut peran teori di dalamnya, yaitu : (1) menggunakan teori sebagai hipotesis; (2) menggunakan teori sebagai panduan umum untuk meneliti (3) menggunakan teori sebagai poin akhir penelitian dan menerapkan proses penelitiannya secara induktif, dan (4) tidak menggunakan teori secara eksplisit.

Dalam penelitian ini, teori kesejahteraan sosial, sinergisme, dan PEL secara eklektik digunakan sebagai pemandu tema-tema penting dalam pengumpulan data serta menganalisis pencapaian dan faktor sinergisme PEL. Tema-tema tersebut tidak bersifat mengikat karena dapat bertambah sesuai dengan temuan lapang.

Penelitian dilaksanakan di Kawasan Telang (Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan) dan Batu Betumpang (Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung). Pada kawasan ini, sedang dikembangkan PEL dengan skema Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan diinisiasi oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Data yang dihimpun dalam penelitian Sinergisme Komponen Pengembangan Ekonomi Lokal ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen. Data primer diperoleh melalui peninjauan langsung ke lapang (*field research*).

Penelitian lapang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan, observasi sederhana, dan *Focus Group Discussion* (FGD).

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis sesuai dengan fokus penelitian. Analisis pencapaian sinergisme komponen PEL dilakukan melalui analisis empat dimensi sinergisme yaitu dimensi sistem, tujuan bersama, proses kolaborasi, dan perubahan efek. Dimensi perubahan efek kesejahteraan terdiri atas perubahan *livelihoods resource*, kondisi usaha, *livelihoods outcome*, dan keterjangkauan penduduk miskin. Selanjutnya, faktor pendorong dan kendala sinergisme komponen PEL, dianalisis dengan metode *theory driven tematik analysis* (mengacu pada Gibsons & Jones, 2012; Braun & Clarke, 2006; Namey, Guest, Thairu & Ajohnson, 2008); dan *Problem Tree Analysis (PTA)* sehingga membentuk anatomi permasalahan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Rona Kawasan dan Proses PEL

Kawasan Telang terletak di Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Kawasan ini meliputi 41 desa yang tersebar di tiga kecamatan yaitu Tanjung Lago, Muara Telang, Sumber Marga Telang. Penduduk di kawasan ini menurut BPS Kabupaten Banyuasin (2013) berjumlah 99.810 orang atau 30.154 keluarga. Mereka umumnya (68,6%) bermatapencaharian sebagai petani dengan komoditas utama padi, jagung, dan kelapa. Sisanya 15,9% buruh tani, dan 15,5,7% non tani.

Kawasan Batu Betumpang terletak di Kabupaten Bangka Selatan. Kawasan ini meliputi sembilan desa yang terletak di tiga Kecamatan yaitu Pulau Besar, Payung, dan Air Gegas. Kawasan ini berpenduduk 24.020 orang atau 8.140 keluarga yang umumnya (> 70%) bekerja sebagai petani (BPS Kabupaten Bangka Selatan, 2013). Komoditas yang diusahakan umumnya adalah padi, karet, lada, dan padi. Penduduk di desa-desa setempat, sebagian juga bekerja sebagai nelayan atau petambak. Sedangkan penduduk di desa-desa transmigrasi selain bertani juga bekerja sebagai buruh penambang timah atau sering disebut Tambang Inkonvensional (TI).

PEL di Kawasan Telang dan Batu Betumpang dilaksanakan dengan skema pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM), sehingga kawasan tersebut juga disebut kawasan KTM. Secara garis besar, kawasan KTM dibagi menjadi dua yaitu bagian pusat KTM dan hinterland KTM. Pusat KTM di Kawasan Telang terletak di Desa Mulyasari, sedangkan pusat KTM Batu Betumpang terletak di Desa Batu Betumpang.

Landasan operasional pembangunan KTM yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP. 124/MEN/V/2007 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pengembangan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi. Peraturan tersebut menyebutkan antara lain bahwa pembangunan KTM bersifat lintas sektor dan multidisiplin sehingga pelaksanaannya membutuhkan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dengan instansi sektor terkait, badan usaha, dan masyarakat. Untuk itu, peraturan tersebut juga mengamanatkan Pemerintah Kabupaten/kota untuk membentuk kelompok kerja (Pokja). Pengorganisasian PEL dalam skema KTM diamanatkan oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: KEP. 214/MEN/V/2007. Peraturan ini antara lain mengamanatkan Pemerintah Kabupaten/kota untuk membentuk kelompok kerja (Pokja) Pengembangan KTM.

Menurut data Bappeda dan Disnakertrans/Disnakertransos Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Bangka Selatan (2013, dan 2014), kegiatan yang sudah dilaksanakan di kedua kawasan cukup banyak (Tabel 4.1). Komponen yang memberikan kontribusi dalam PEL tidak

saja dari Pemerintah tetapi juga dari Badan Usaha/"pasar" dan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan Pemerintah dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah SKPD. Masing-masing SKPD melaksanakan kegiatannya dengan atau tanpa partisipasi masyarakat dan Badan Usaha/"pasar" sesuai dengan jenis kegiatan dan pendekatan yang digunakan.

Tabel 4.1. Kegiatan PEL di KTM Telang dan Batu Betumpang

No	Komponen Yang Berperan	Kegiatan	
		Kawasan Telang*)	Kawasan Batu Betumpang**)
A. Pemerintah/Pemerintah Daerah			
1	Nakertrans (Pusat, Prov, Kab)	a. Pembangunan prasarana pusat KTM b. Pengembangan LKM c. Ujicoba budidaya padi IP 200 d. Pengembangan Primatani-Trans e. Pengembangan kewirausahaan f. Pengembangan ternak sapi g. Pertanian organik h. Industri pupuk organik i. Pelatihan Mitigasi Lingkungan. j. Bantuan Alsintan k. Pengembangan RMP l. Pelatihan Pengembangan Mutu Produk m. Ujicoba kedele n. Pembenihan padi o. Pelatihan <i>handycraft</i> p. Pelatihan kewirausahaan	a. Pembangunan prasarana pusat KTM b. Bantuan modal RMP/RMU c. Bantuan pemasangan listrik bagi penduduk miskin d. Pengembangan manajemen RMP e. Bantuan Hand Traktor f. Desain detil pembangunan pasar g. Pelatihan kewirausahaan h. Pelatihan koperasi i. Bantuan mesin dan bangunan RMP/RMU j. Pengadaan hand traktor k. Pengadaan gerobak motor l. Sosialisasi dan percontohan Kesling KTM m. Bantuan ternak sapi n. Pengembangan kewirausahaan o. Pelatihan kewirausahaan
2	Dinas Pertanian dan dan Peternakan (Distanak)	a. Pengembangan peternakan sapi b. Pengembangan PUAP c. Pengembangan Agribisnis d. Pengembangan padi IP 200 e. Pengembangan budidaya jagung f. Pelatihan Biogas g. Pembenihan padi h. Peningkatan jalan usaha tani i. Penyediaan irigasi permukaan	a. Pembuatan kebun hortikultura b. Pembangunan kandang sapi c. Bantuan sapi bergulir d. Pembuatan SID percetakan sawah e. Pembuatan JUT hortikultura f. Penyuluhan Budidaya padi g. Pembinaan Gapoktan/kelompok tani h. Fasilitasi distribusi pupuk i. Bantuan ternak sapi
3	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag)/Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindakop)	Pengembangan koperasi Pelatihan kewirausahaan Industri pupuk organik Pelatihan Pengembangan Investasi Pelatihan kemudahan izin usaha Pelatihan pembuatan bandeng Pelatihan pembuatan	Pelatihan pengolahan hasil perikanan Pelatihan Industri kecil Membuat bandeng presto dan Kue Pelatihan pengawasan mutu RMU
4	Dinas Kelautan dan Perikanan (Dis KP)	Pelatihan budidaya ikan lele -	Rehabilitasi dermaga Pengembangan pembudidaya ikan Pembangunan kolam ikan
5	Dinas Pekerjaan Umum (Dis PU) Pengairan, Jasa Marga, dan Bina Marga	Pengembangan infrastruktur Pembangunan <i>Watertreatment Plant</i>	Peningkatan jalan dan jembatan Peningkatan saluran irigasi Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Pembuatan peta jaringan irigasi
6	Kantor Pengelola Pasar	Pembangunan los pasar Pengelolaan pasar	-
7	Badan Ketahanan Pangan (BKP)/ Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K)	Penyuluhan Demplot jagung	Pembangunan lumbung pangan Pembuatan demplot Penyuluhan Gapoktan/kelompok tani Pelatihan perawatan ternak dan kompos Pelatihan kewirausahaan Pelatihan budidaya hortikultura Pelatihan pengolahan pakan ternak
8	Dinas Pendidikan	Pembangunan SMK	Pembangunan SMK

No	Komponen Yang Berperan	Kegiatan	
		Kawasan Telang*)	Kawasan Batu Betumpang**)
	(Disdik)		
10	Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun)	Pelatihan bahaya kebakaran hutan - -	Pembuatan JUT perkebunan Peningkatan jalan usaha tani Pengembangan kebun dan pembibitan lada Pengembangan kebun karet
11	Dinas Kesehatan	Pengembangan Puskesmas	Pengembangan Puskesmas Rawat Inap
12	Dinas Perhubungan (Dishub)	Fasilitasi Angkutan Perintis	Fasilitasi Angkutan Perintis
B. Badan Usaha dan "Pasar"			
13	BRI	Membuka gerai layanan jasa keuangan	-
14	Bank Sumsel		-
15	PDAM	Membangun fasilitas air bersih	-
16	PT Pusri	a. Pengembangan pembenihan padi b. Distribusi pupuk	Distribusi pupuk
17	Bulog	Rehabilitasi Gudang	-
18	PLN	Penyediaan jasa listrik	Penyediaan jasa listrik
19	"Pasar"	a. Penyediaan sarana produksi b. Penampungan hasil pertanian c. Penyediaan bahan konsumsi	a. Penyediaan sarana produksi b. Penampungan hasil pertanian c. Penyediaan bahan konsumsi
20	PT Damri	Angkutan perintis	Angkutan perintis
C. Kelembagaan/Organisasi Masyarakat			
21	Koperasi BMT Trans	Membuka gerai layanan jasa keuangan syariah	-
22	Gapoktan dan kelompok tani	a. Koordinasi kegiatan kelompok tani b. Pengelolaan RMP	a. Koordinasi kegiatan kelompok tani b. Pencetakan sawah c. Peningkatan saluran irigasi d. Penyediaan permodalan e. Pengelolaan RMU/RMP
23	Himpunan Wirausaha Transmigrasi	Mengkoordinasikan kegiatan wirausaha	Mengkoordinasikan kegiatan wirausaha
24	Kelompok peternak	Mengembangkan usaha ternak	Mengembangkan kelompok ternak sapi
25	Kelompok pembibitan lada	-	Pembibitan lada
26	Kelompok pembudidaya ikan	-	Pengembangan budidaya ikan/tambak

Sumber : *) Bappeda Kabupaten Banyuasin (2013 dan 2014); Disnakertrans Kabupaten Banyuasin, (2013 dan 2014)

***) Bappeda Kabupaten Bangka Selatan (2013 dan 2014); Disnakertransos Kabupaten Bangka Selatan (2013, 2014)
(Data sudah diolah kembali)

4.2. Sinergisme Komponen PEL

Berdasarkan hasil analisis empat dimensi sinergisme, kategori kolaborasi komponen PEL di Kawasan Telang berbeda dengan di Kawasan Batu Betumpang. Kolaborasi di Kawasan Telang masuk dalam kategori terfragmentasi, sedangkan di Kawasan Batu Betumpang termasuk dalam kategori kurang sinergis. Indikasi kolaborasi di kedua lokasi tersebut, berbeda dalam hal dimensi sistem, tujuan bersama, dan proses, tetapi hampir sama dalam hal efek PEL (Tabel 4.2). Dimensi sistem di Telang misalnya, tidak tersistem dan tidak terklaster, sedangkan di Batu Betumpang tersistem tetapi tidak komprehensif dan tidak direpresentasikan dalam model. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam Gambar 4.1 dan 4.2.

Tujuan kolaborasi di Telang tidak dirumuskan bersama dan kurang dipahami oleh masing-masing komponen. Sedangkan di Batu Betumpang, tujuan umum tidak disusun

bersama, tetapi ada sasaran klaster yang disekapati dan dipahami oleh sebagian komponen. Sasaran klaster tersebut kurang legitimasi karena tidak tertulis dan tidak dilegalkan.

Tabel 4.2. Perbandingan Tingkat Kolaborasi dan Indikasi Sinergisme PEL di Kawasan Telang dan Batu Betumpang

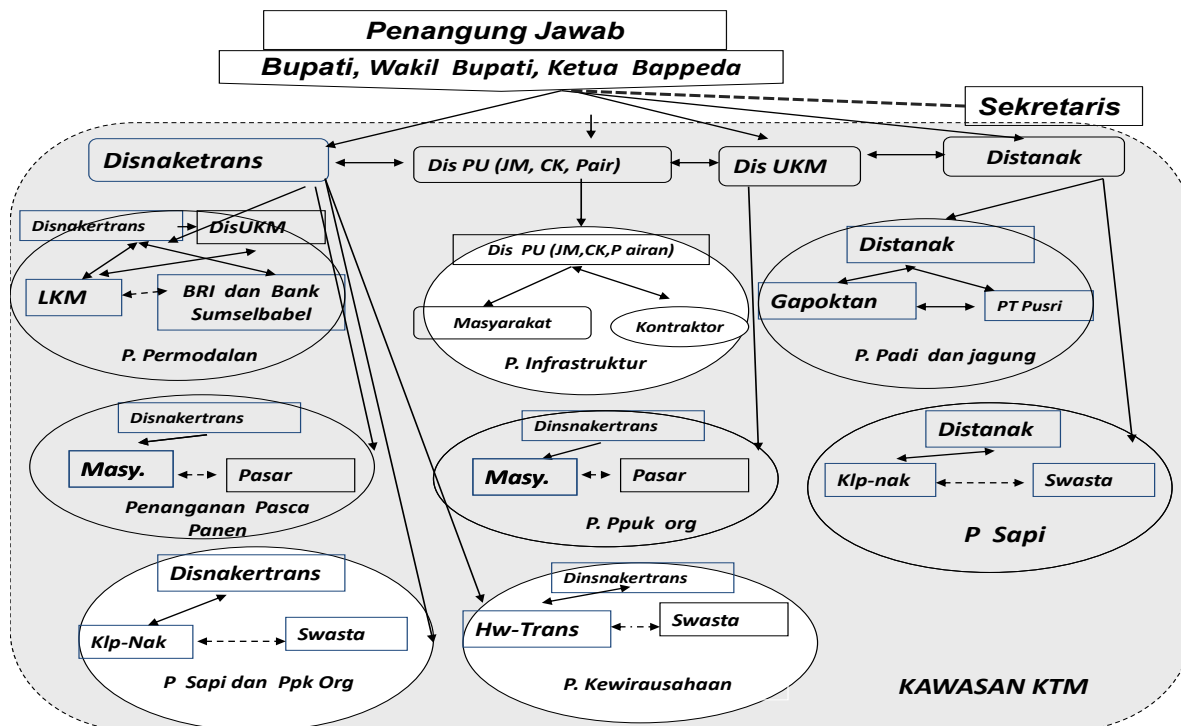
No	Dimensi Sinergisme	Indikasi		
		Kawasan Telang	Kawasan Batu Betumpang	
1	Sistem	Tidak tersistem dan tidak terklaster	Sebagian tersistem dalam klaster (padi dan sapi) tetapi tidak komprehensif, lainnya tidak tersistem	
2	Tujuan bersama	Tujuan tidak dirumuskan bersama. Tujuan yang dirumuskan umumnya kurang dipahami oleh sebagian besar komponen	Tujuan utama tidak disusun bersama. Sasaran klaster disekapati sebagian komponen, tetapi tidak disekapati dan mengakomodasi kepentingan komponen lainnya	
3	Proses kolaborasi	Komitmen pimpinan untuk membangun sinergi kurang	Komitmen pimpinan untuk membangun sinergi kurang	
		Komitmen SKPD untuk berkontribusi tinggi, tetapi komitmen untuk bersinergi kurang	Komitmen SKPD untuk bersinergi bervariasi dari tinggi sampai kurang	
		Komitmen badan usaha/"pasar" umumnya tinggi	Komitmen badan usaha/"pasar" bervariasi dari tinggi sampai kurang	
		Partisipasi masyarakat bervariasi tinggi sampai nihil	Partisipasi masyarakat bervariasi dari tinggi sampai nihil	
4	Efek PEL pada kesejahteraan sosial	Kolaborasi sudah memberikan efek positif pada kesejahteraan sosial tetapi belum optimal dan belum merata.	Kolaborasi sudah memberikan efek positif pada kesejahteraan sosial tetapi belum optimal dan belum merata.	
		a. <i>Livelihoods resource</i>	<i>Livelihoods resource</i> meningkat tetapi belum optimal dan tidak merata	<i>Livelihoods resource</i> meningkat tetapi belum optimal dan tidak merata
		b. <i>Livelihoods</i>	Kondisi usaha/pekerjaan umumnya meningkat (terutama di desa pusat KTM dan sekitarnya), tetapi belum optimal dan tidak merata	Kondisi usaha/pekerjaan umumnya meningkat (terutama di desa pusat KTM dan sekitarnya), tetapi belum optimal (kecuali padi) dan tidak merata
		c. <i>Livelihoods outcome</i>	Pendapatan umumnya meningkat dan biaya kebutuhan dasar umumnya menurun, tetapi kurang optimal dan tidak merata	Pendapatan umumnya meningkat dan biaya kebutuhan dasar umumnya menurun, tetapi kurang optimal dan tidak merata
		d. Keterjangkauan keluarga miskin	Keterjangkauan penduduk miskin kurang optimal. Sebagian besar kegiatan PEL menjangkau keluarga miskin pada desa yang terjangkau program, kecuali dalam kegiatan yang pesertanya terbatas. Program PEL belum menjangkau masyarakat miskin pada desa yang terletak relatif jauh dari pusat KTM	Keterjangkauan penduduk miskin kurang optimal. Sebagian besar kegiatan PEL menjangkau keluarga miskin pada desa yang terjangkau program, kecuali dalam hal kegiatan yang pesertanya terbatas. Program PEL belum menjangkau masyarakat miskin pada desa yang terletak relatif jauh dari pusat KTM
Kategori Kolaborasi		Terfragmentasi	Kurang sinergis	

Sumber : Hasil analisis tematik empat dimensi sinergisme

Dilihat dari dimensi proses kolaborasi, ada perbedaan di kedua kawasan. Komitmen SKPD untuk membangun sinergi di Telang kurang, sedangkan di Batu Betumpang bervariasi dari tinggi hingga kurang. Komitmen Badan usaha di Telang umumnya tinggi, sedangkan di Batu Betumpang bervariasi dari tinggi sampai rendah. Partisipasi masyarakat di kedua kawasan bervariasi dari nihil sampai tinggi. Demikian seterusnya, perbedaan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 4.2.

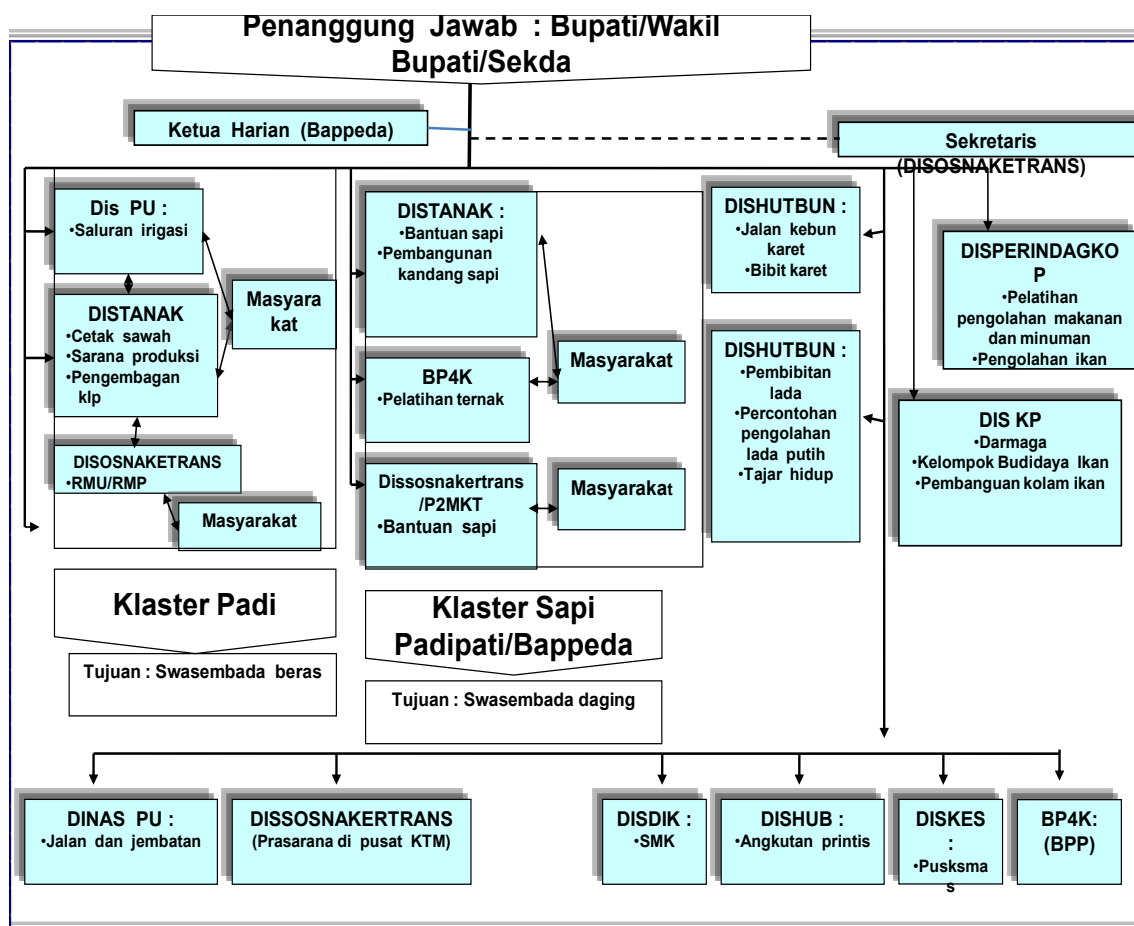
PEL di kedua kawasan secara umum memberikan efek yang hampir sama yaitu telah meningkatkan kesejahteraan sosial tetapi belum optimal dan tidak merata. Walaupun

demikian, jika dicermatri lebih lanjut, efek di Batu Betumpang lebih baik dibandingkan dengan di Telang. Pengembangan komoditas padi di kawasan Batu Betumpang, sudah tersistem walaupun sistem belum komprehensif dan belum legitimasi. PEL memberikan efek cukup baik pada kluster padi melalui perbaikan kondisi lahan sehingga petani yang semula hanya menanam padi sekali dalam tiga tahun menjadi 1-2 kali dalam satu tahun; peningkatan kompetensi petani di bidang budidaya sehingga produksi meningkat dari dua menjadi tiga hingga empat ton/ha; serta perbaikan pada subsistem pengolahan dan pemasaran sehingga kendala pemasaran padi pada waktu musim panen dapat diatasi. Hal ini antara lain karena kolaborasi di Batu Betumpang lebih sinergis dibandingkan dengan di Telang.



Sumber : Visualisasi terhadap hasil wawancara, observasi, analisis dokumen
Gambar 4.1. Model Kolaborasi PEL Eksisting di Kawasan Telang

Kegiatan PEL di kedua kawasan umumnya menjangkau penduduk tanpa membedakan strata sosial, kecuali kegiatan dengan peserta/sasaran terbatas. Kegiatan dengan kelompok sasaran terbatas (seperti pelatihan dalam kelas dan pengembangan usaha mikro dengan peserta terbatas) cenderung hanya dinikmati oleh elit desa. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Laksmono (1999) yang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia ada gejala *off target* dimana kelompok paling miskin pada strata masyarakat cenderung dihindari. Untuk itu, Dissos/Dissosnanakertrans dan Pemerintah Desa perlu dimasukkan sebagai salah satu komponen PEL. Dissos/Dissosnanakertrans berperan dalam program KUBE bagi penduduk miskin yang membutuhkan pendekatan khusus untuk meningkatkan kompetensinya dan penduduk miskin yang komoditas usahanya tidak termasuk dalam kluster. Pasal 127 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan antara lain Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa bertugas antara lain melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa dengan menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin.



Sumber : Visualisasi terhadap hasil wawancara dengan berbagai informan, observasi, dan analisis dokumen

Gambar 4.2. Sistem Kolaborasi PEL Eksisting di Kawasan Batu Betumpang

4.3. Faktor Pendorong dan Kendala Sinergisme

Proposisi penelitian ini yakni : keberhasilan kolaborasi komponen PEL untuk mencapai tingkat sinergisme dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor perencanaan kolaboratif, kesepakatan, komunikasi, kepemimpinan, komitmen, partisipasi masyarakat, kepercayaan, legitimasi, konflik kepentingan, *readiness*, kapabilitas kolaborasi, motivasi, sistem kolaborasi, tujuan bersama, keadilan, dan faktor eksternal. Penelitian di kedua kawasan memperlihatkan bahwa sebagian besar faktor tersebut memberikan indikasi sebagai faktor pendorong dan atau kendala sinergisme komponen PEL.

Legitimasi, komunikasi, kepemimpinan, komitmen, partisipasi masyarakat, kepercayaan, motivasi, keadilan, dan kesepakatan; masing-masing memberikan indikasi sebagai faktor pendorong baik di Kawasan Telang maupun Batu Betumpang. Sedangkan tujuan bersama, sistem kolaborasi, kapabilitas kolaborasi, kesiapan, dan perencanaan kolaboratif; hanya terindikasi sebagai faktor pendorong di Batu Betumpang saja.

Dari enam belas faktor yang diidentifikasi, seluruhnya secara konsisten memberikan indikasi sebagai faktor kendala di kedua kawasan, walaupun beberapa diantaranya dengan indikasi yang berbeda. Sebagai contoh indikasi yang berbeda ditunjukkan antara lain oleh faktor kapabilitas kolaborasi. Di Kawasan Telang, kurangnya kapabilitas kolaborasi diindikasikan oleh Pokja yang tidak membangun sistem dan menetapkan tujuan bersama. Sedangkan di Kawasan Batu Betumpang, kapabilitas kolaborasi kurang dengan indikasi Pokja sudah membangun sistem tetapi sistem yang dibangun tidak komprehensif dan kurang

legitimasi. Sebagai contoh indikasi yang sama ditunjukkan antara lain oleh faktor keadilan. Di kedua kawasan, faktor keadilan diindikasikan oleh penduduk miskin yang cenderung tidak terjangkau oleh kegiatan PEL dengan peserta terbatas dan penduduk pada desa-desa yang jauh dari pusat KTM yang belum terjangkau oleh sebagian besar kegiatan PEL.

Sebagian besar faktor, disamping menunjukkan indikasi sebagai faktor kendala, sekaligus juga memberikan indikasi sebagai faktor pendorong, sebagian dengan indikasi yang berbeda. Sebagai contoh kesepakatan memberikan indikasi sebagai faktor pendorong dan kendala di kedua kawasan. Adanya kesepakatan pengembangan KTM, menjadi faktor pendorong sinergisme di kedua kawasan. Demikian pula tidak adanya kesepakatan tujuan utama dan rencana dalam Masterplan, menjadi faktor kendala sinergisme di kedua kawasan. Selengkapnya pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Perbandingan Indikasi Faktor Pendorong dan Kendala Sinergisme PEL di Kawasan Telang dan Batu Betumpang

No	Pendorong /Kendala	Indikasi Faktor Pendorong dan Kendala Sinergisme PEL *)	
		Telang	Batu Betumpang
1.	Pendorong	-	Perencanaan kolaboratif (dilakukan redesain terbatas secara kolaboratif oleh Pokja)
		Kesepakatan (ada kesepakatan pengembangan KTM)	Kesepakatan (ada kesepakatan pengembangan KTM dan sasaran padi/sapi yang dirumuskan Pokja)
		Komunikasi (komunikasi antar komponen umumnya baik)	Komunikasi (komunikasi antar SKPD dengan sebagian masyarakat umumnya baik)
		Kepemimpinan (pimpinan memiliki komitmen tinggi untuk mengalokasikan dana di kawasan KTM)	Kepemimpinan (pimpinan memiliki komitmen tinggi untuk mengalokasikan dana dan membangun sinergisme)
		Komitmen (komitmen SKPD dan badan usaha/"pasar" untuk berkontribusi tinggi)	Komitmen (komitmen SKPD untuk berkontribusi tinggi, komitmen sebagian SKPD untuk berkolaborasi tinggi, komitmen sebagian Badan usaha tinggi)
		Partisipasi masyarakat (partisipasi sebagian masyarakat tinggi)	Partisipasi masyarakat (sebagian masyarakat memiliki partisipasi tinggi)
		Kepercayaan (kepercayaan antar komponen umumnya baik)	Kepercayaan (kepercayaan antar komponen umumnya baik)
		Legitimasi (ada legitimasi prosedural terhadap KTM, Organisasi Pokja, dan program masing-masing sektor)	Legitimasi (ada legitimasi prosedural terhadap KTM, Organisasi Pokja, dan program masing-masing sektor)
		-	Kesiapan (sebagian komponen sudah siap, karena sudah ada sasaran klaster padi dan sapi)
		-	Kapabilitas kolaborasi (SDM sudah menyadari pentingnya tujuan bersama dengan menetapkan sasaran klaster padi dan sapi)
		Keadilan (sebagian besar kegiatan menjangkau penduduk tanpa membedakan kaya atau miskin)	Keadilan (sebagian besar kegiatan menjangkau penduduk tanpa membedakan kaya dan miskin)
		Motivasi (motivasi sebagian SKPD dan masyarakat tinggi)	Motivasi (motivasi sebagian SKPD dan masyarakat tinggi) Motivasi sebagian SKPD tinggi
		-	Sistem kolaborasi (Pokja merumuskan sistem kolaborasi untuk klaster padi meskipun tidak tertulis)
		-	Tujuan bersama (ada sasaran yang disusun bersama untuk klaster padi dan sapi)

No	Pendorong /Kendala	Indikasi Faktor Pendorong dan Kendala Sinergisme PEL *)	
		Telang	Batu Betumpang
2	Kendala	Perencanaan kolaboratif (Masterplan tidak disusun bersama/perencanaan kolaboratif tidak dilakukan)	Perencanaan kolaboratif (Masterplan tidak disusun bersama. Redesain perencanaan kolaboratif tidak mengakomodasi kepentingan semua komponen)
		Kesepakatan (tidak ada kesepakatan tujuan dan rencana dalam Masterplan, karena tidak ada perencanaan kolaboratif)	Kesepakatan (tidak ada konsensus tujuan dalam Masterplan, sasaran klaster padi/sapi hanya disepakati oleh sebagian komponen)
		Komunikasi (komunikasi non formal terbatas, komunikasi dengan sebagian masyarakat pada sebagian kegiatan kurang)	Komunikasi (komunikasi antara SKPD dengan "pasar"/badan usaha dan sebagian masyarakat kurang)
		Kepemimpinan (pimpinan kolaborasi kurang memiliki komitmen dan kapabilitas untuk membangun sinergisme)	Kepemimpinan (pimpinan kolaborasi kurang memiliki kapabilitas untuk membangun sinergisme)
		Komitmen (komitmen SKPD untuk bersinergi umumnya rendah)	Komitmen (sebagian SKPD dan Badan Usaha untuk berkolaborasi umumnya rendah)
		Partisipasi masyarakat (sebagian masyarakat tidak atau kurang berpartisipasi, karena tidak terjangkau atau kegiatan kurang partisipatif)	Partisipasi masyarakat (sebagian masyarakat tidak atau kurang berpartisipasi, karena tidak terjangkau, tidak dilibatkan, atau kegiatan kurang partisipatif)
		-	Kepercayaan (kepercayaan masyarakat pada awalnya kurang)
		Legitimasi (legitimasi rencana dan tujuan dalam Materplan kurang karena tidak disusun bersama)	Legitimasi (legitimasi sasaran dan tujuan yang dirumuskan Pokja kurang karena tidak dilegalkan).
		Konflik kepentingan (ada konflik kepentingan alokasi <i>resource</i> (waktu, tenaga, pemikiran) karena peraturan/target sektoral	Konflik kepentingan (ada konflik sosial pada awal pembangunan, ada konflik kepentingan alokasi <i>resource</i> pada sebagian komponen karena peraturan/target sektoral)
		<i>Readiness</i> (sebagian besar komponen tidak tahu harus berbuat apa)	<i>Readines</i> (sebagian komponen tidak tahu harus berbuat apa, karena sistem tidak komprehensif)
		Kapabilitas kolaborasi (kapabilitas kolaborasi kurang sehingga : Pokja tidak membangun sistem dan menetapkan tujuan bersama, peraturan tidak mengamanahkan sistem dan tujuan bersama)	Kapabilitas kolaborasi (kapabilitas kolaborasi kurang sehingga : Sistem yang dibangun tidak komprehensif dan kurang legitimasi, peraturan tidak mengamanahkan sistem dan tujuan bersama)
		Keadilan (penduduk miskin cenderung tidak terjangkau oleh kegiatan PEL yang pesertanya terbatas, penduduk pada desa-desa yang jauh dari pusat KTM belum terjangkau)	Keadilan (penduduk miskin cenderung tidak terjangkau oleh kegiatan PEL yang pesertanya terbatas, penduduk pada desa-desa yang jauh dari pusat KTM belum terjangkau)
		Motivasi (motivasi SKPD untuk membangun sinergisme rendah, motivasi sebagian masyarakat untuk berpartisipasi rendah)	Motivasi (motivasi sebagian SKPD untuk membangun sinergisme rendah, motivasi sebagian masyarakat untuk berpartisipasi rendah)
		Sistem kolaborasi (kolaborasi terfragmentasi/tidak tersistem)	Sistem kolaborasi (sistem yang disusun tidak komprehensif dan kurang legitimasi)
Tujuan bersama (tujuan tidak dirumuskan bersama, tidak mewedahi kepentingan bersama, dan kurang dipahami oleh sebagian komponen)	Tujuan bersama (tujuan utama tidak disusun bersama, sasaran klaster tidak mewedahi kepentingan bersama dan kurang legitimasi)		
Faktor eksternal (adanya target dan peraturan sektoral)	Faktor eksternal (adanya target dan peraturan sektoral)		

Sumber : Hasil analisis tematik secara triangulasi dari hasil wawancara dengan informan, data sekunder, dan observasi.

Analisis PTA (Gambar 4.3 dan 4.4) di kedua kawasan memperlihatkan bahwa kesiapan atau ketidaksiapan/*readiness* secara konsisten menjadi faktor yang berpengaruh langsung pada sinergisme. Selain itu, faktor ini juga berpengaruh secara langsung dan atau tidak langsung pada komitmen dan motivasi SKPD, serta partisipasi masyarakat. *Readiness* ditunjukkan oleh komponen yang umumnya tidak tahu harus berbuat apa untuk mendukung proses sinergisme. Sementara itu, kesiapan sebagian komponen menjadi faktor pendorong sinergisme di kawasan Batu Betumpang. Pentingnya faktor ini sesuai dengan pendapat Rosas (2009) dan Hall, *at all* (2008) yang menyatakan bahwa *readiness* merupakan faktor yang dapat menghambat keberhasilan kolaborasi pada saat awal, selama proses, maupun akhir kolaborasi. Oleh sebab itu, upaya-upaya untuk meningkatkan kesiapan komponen dalam berkolaborasi, sangat penting dilakukan guna meningkatkan sinergisme.

Faktor lain yang berpengaruh langsung pada sinergisme adalah komitmen dan partisipasi masyarakat. Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat disebabkan antara lain oleh faktor eksternal dan internal dari masyarakat. Faktor eksternal antara lain faktor keadilan dengan indikasi sebagian masyarakat tidak terjangkau, tidak tahu, dan tidak dilibatkan dalam proses PEL sehingga sebagian masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk berpartisipasi. Menurut Soelaiman (1980) salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi adalah kesempatan untuk berpartisipasi. Faktor internal partisipasi sebagaimana hasil wawancara dengan informan adalah motivasi sebagian masyarakat untuk berpartisipasi masih kurang karena ada kepentingan lain yang dianggap oleh masyarakat bersangkutan lebih menguntungkan, belum ada contoh KTM yang berhasil, tidak mampu berpartisipasi, atau masyarakat tidak tahu bagaimana berpartisipasi.

Di Kawasan Telang, komitmen SKPD untuk berkontribusi dalam bentuk kegiatan dalam PEL umumnya tinggi, tetapi komitmen bersinergi kurang. Di Kawasan Batu Betumpang, komitmen sebagian SKPD rendah. Akibatnya, banyak kegiatan dilakukan tetapi tidak saling berkaitan secara terencana. Kurangnya komitmen SKPD untuk bersinergi disebabkan karena faktor kendala *readiness* yaitu ketidaksiapan yang menyebabkan SKPD tidak tahu harus bagaimana membangun sinergisme. Dari sisi lain, kurangnya komitmen juga disebabkan oleh adanya konflik kepentingan dan kurangnya motivasi untuk bersinergi (Gambar 4.3 dan 4.4).

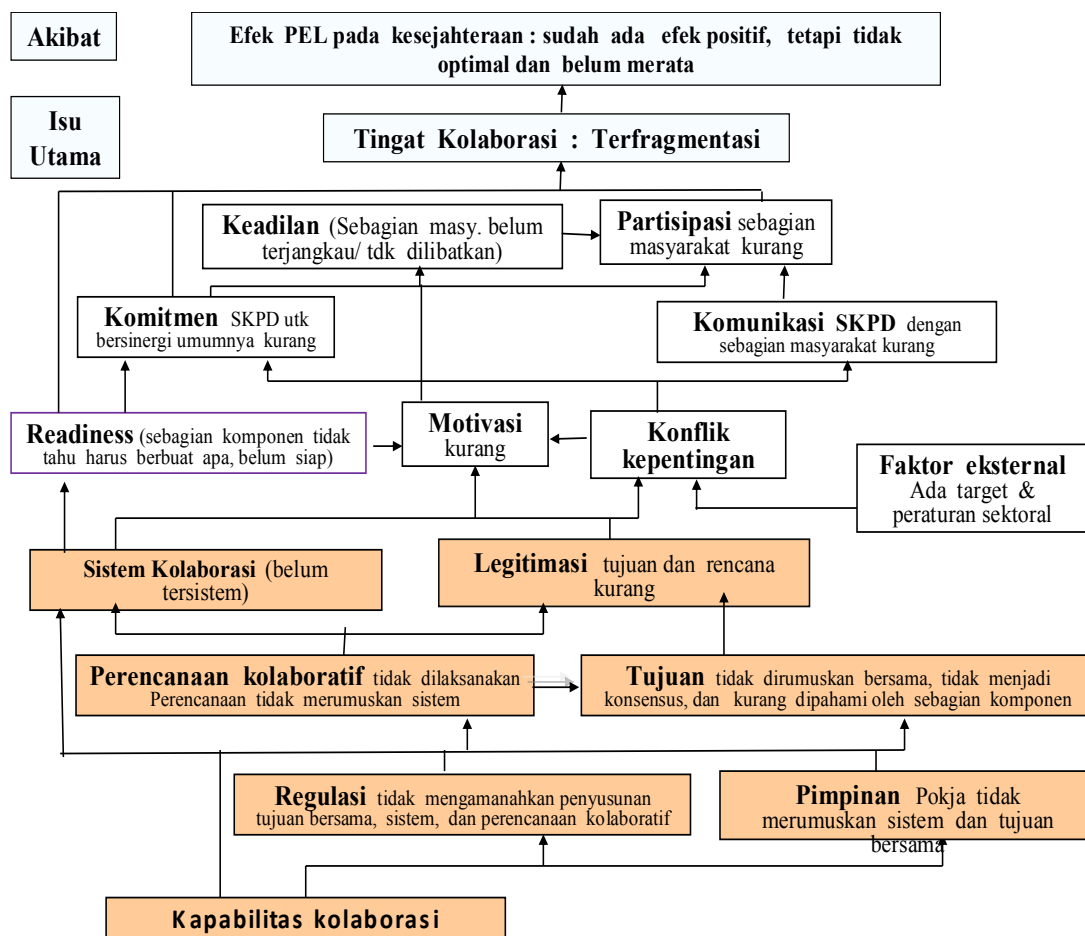
Konflik kepentingan mempengaruhi komitmen SKPD untuk bersinergi. Hal ini karena sinergi dibangun dengan melibatkan lintas instansi, sementara mereka juga memiliki prioritas dan kesibukan untuk mengejar target sektoral masing-masing, sebagai akibat adanya faktor eksternal yaitu target dan peraturan masing-masing sektor. Akibatnya, masing-masing SKPD cenderung memprogramkan kegiatan sesuai target sektoral masing-masing, bukan karena sistem atau tujuan bersama. Hal ini sesuai dengan pendapat Argandoña (2004) yang berpendapat bahwa konflik kepentingan sering muncul dalam situasi di mana kepentingan lembaga terganggu atau memiliki potensi terganggu oleh kepentingan pihak lain di luar kesepakatan. Oleh sebab itu, faktor eksternal berupa kebijakan dan target sektoral penting untuk dipertimbangkan dalam menyusun tujuan bersama dan model sinergisme.

4.4. Faktor Pemicu

Analisis PTA di kedua kawasan menunjukkan bahwa kapabilitas kolaborasi secara konsisten menjadi akar masalah yang memicu munculnya faktor regulasi, kepemimpinan, perencanaan kolaboratif, tujuan bersama, sistem kolaborasi, dan legitimasi. Ketujuh faktor tersebut secara bertautan dan konsisten menjadi pemicu bagi munculnya faktor-faktor lainnya seperti *readiness*, komitmen sebagian SKPD, keadilan, konflik kepentingan, tujuan bersama,

legitimasi, motivasi, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, faktor eksternal berupa target dan kebijakan sektoral juga konsisten menjadi pemicu munculnya konflik kepentingan di kedua kawasan. Namun, dampak faktor eksternal akan dapat diminimalkan apabila faktor tersebut dipertimbangkan dalam penyusunan model dan tujuan bersama, dan ketujuh faktor pemicu sebagaimana tersebut di atas dapat diatasi.

Pentingnya kapabilitas kolaborasi dan kepemimpinan dalam membangun sinergisme sesuai dengan pendapat Bryson, Crosby, and Stone (2006); McGuire (2006); dan Andrushko (2012). Bryson, Crosby, and Stone (2006) berpendapat bahwa kepemimpinan merupakan salah satu syarat penting untuk membangun sinergi organisasi yang terdeferensiasi. Sementara menurut McGuire (2006) sinergisme membutuhkan pemimpin yang handal, terampil, dan berkomitmen dalam membangun sinergisme. Sedangkan menurut Andrushko (2012) untuk mencapai sinergisme dibutuhkan seorang manajer yang tegas dan memiliki kemampuan berpikir untuk menemukan jalan baru ketika menghadapi jalan buntu dalam berkolaborasi.

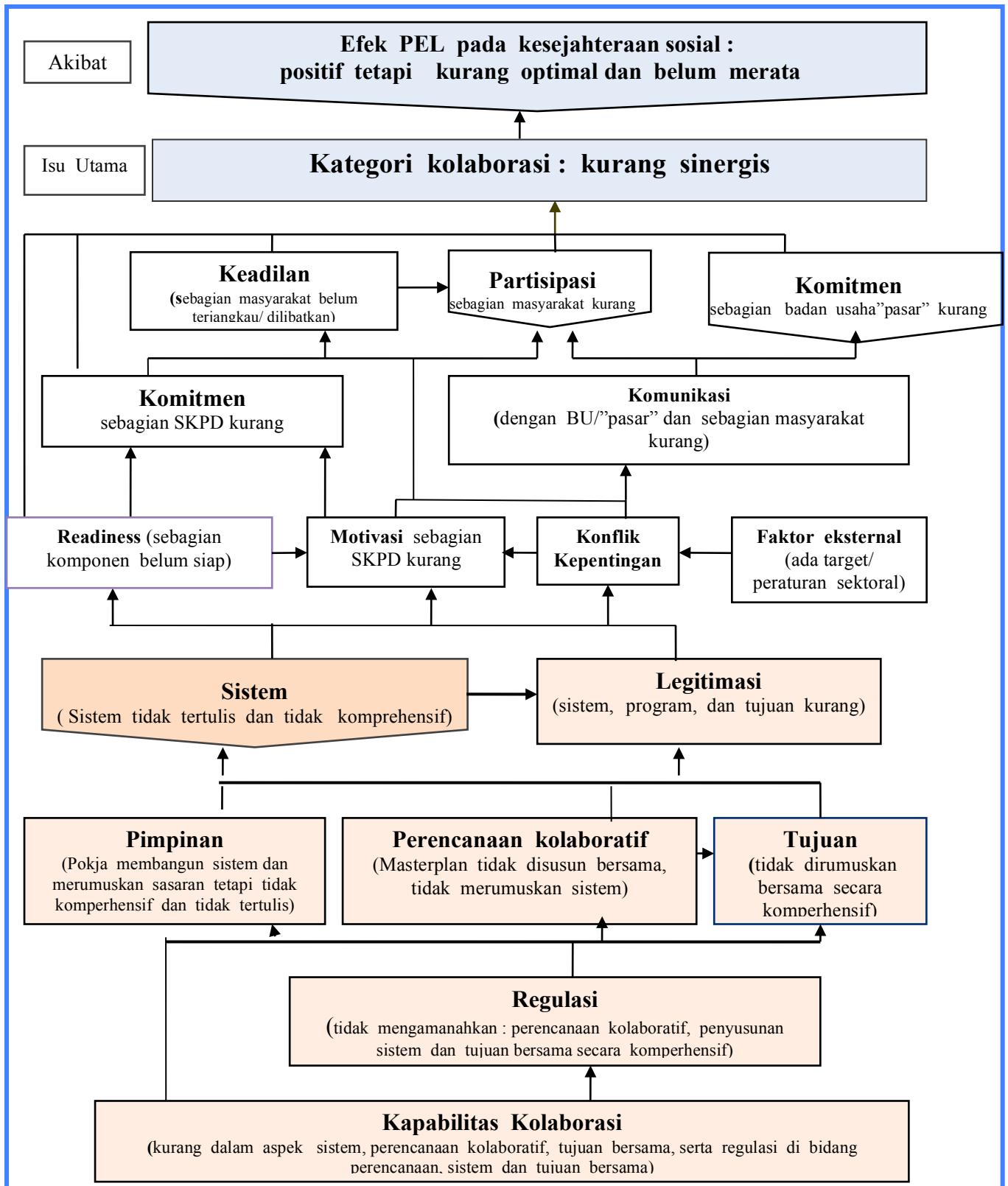


Sumber: Hasil FGD DI Kawasan Telang

Gambar 4.3. Analisis Pohon Masalah Sinergisme Komponen PEL Untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Kawasan Telang

Legitimasi organisasi secara konsisten menjadi faktor pendorong di kedua kawasan, tetapi legitimasi rencana dan tujuan yang disusun dalam Masterplan di kedua kawasan menunjukkan indikasi kurang karena tidak disusun bersama sehingga menjadi kendala sinergisme. Di Kawasan Batu Betumpang, walaupun dibangun sistem dan sasaran klaster kolaborasi, tetapi karena tidak dilegalkan sehingga kurang legitimasinya. Pentingnya faktor

legitimasi dalam proses kolaborasi dikemukakan antara lain oleh Bryson, Crosby, and Stone (2006). Oleh sebab itu, untuk meningkatkan legitimasi, sistem dan tujuan harus disusun bersama dan dilegalkan dalam bentuk regulasi daerah.



Sumber: Hasil FGD di Kawasan Batu Betumpang

Gambar 4.4. Analisis Pohon Masalah Sinergisme Komponen PEL di Kawasan Batu Betumpang

Hasil analisis PTA di Kawasan Telang dan Batu Betumpang sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 4.3 dan 4.4, juga memperlihatkan bahwa kolaborasi yang tidak tersistem secara komprehensif dipicu antara lain oleh belum diterapkannya perencanaan kolaboratif. Dalam konteks sinergisme PEL berbasis kawasan, perencanaan seharusnya dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan kolaboratif yang menghasilkan konsensus (Healey, 2006; Bryson, Crosby, and Stone, 2006; Innes and Booher, 2010). Konsensus dalam hal ini meliputi konsensus tujuan bersama, program-program yang dikembangkan, serta sistem kolaborasi komponen PEL yang dituangkan dalam bentuk model yang komprehensif.

Belum dilaksanakannya perencanaan kolaboratif, diakibatkan oleh regulasi yang tidak mengamanahkan perencanaan kolaboratif serta kapabilitas kolaboratif yang masih terbatas diantara aktor termasuk yang merumuskan peraturan. Hal itu terjadi baik di Telang maupun Batu Betumpang. Sebagaimana dikatakan Bryson, Crosby, and Stone (2006) bahwa membangun legitimasi merupakan salah satu syarat penting untuk terjadinya sinergisme. Sementara itu menurut Surbakti (1999) regulasi merupakan salah satu sumber legitimasi yang penting, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan akan melaksanakan aturan-aturan yang disepakati. Menurut OECD (2010), regulasi merupakan bagian integral dari Pemerintahan yang efektif untuk membantu hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Selanjutnya dikatakan bahwa regulasi yang efektif akan memberikan dukungan pada pengaturan pembangunan ekonomi dan aturan hukum yang efektif, membantu para pembuat kebijakan untuk memahami tentang apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan, dan bagaimana melakukannya. Sebagaimana dikatakan Bryson, Crosby, dan Stone (2006) bahwa membangun legitimasi merupakan salah satu syarat penting untuk terjadinya sinergisme. Sementara itu menurut Surbakti (1999) bahwa regulasi merupakan salah satu sumber legitimasi yang penting, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan akan melaksanakan aturan-aturan yang disepakati. Regulasi merupakan seperangkat perintah atau mekanisme yang dirancang secara sengaja oleh pemerintah atau badan swasta untuk membatasi atau mencegah perilaku yang tidak diinginkan, serta mendorong atau memfasilitasi perilaku yang diinginkan (Baldwin, Cave, and Ode, 1912). Selanjutnya dikatakan bahwa penyusunan regulasi memiliki berbagai alasan; diantaranya kebutuhan untuk menyebarluaskan informasi, adanya eksternalitas, menghindari pengaruh *moral hazard*, terjadinya kemungkinan kegagalan pasar, kebutuhan untuk memperoleh manfaat yang besar, menjaga kesinambungan dan ketersediaan layanan, mengatasi adanya perilaku anti kompetisi dan *predatory pricing*, melindungi kepentingan tertentu untuk keadilan, dan pendistribusian untuk mengatasi kelangkaan sumberdaya.

Kolaborasi yang tidak tersistem atau tersistem secara tidak komprehensif, menjadi kendala sinergisme PEL di kedua lokasi. Mengacu pada definisi sinergisme, sistem merupakan salah satu unsur utama dalam membangun sinergisme. Selain itu, Bryson, Crosby, and Stone (2006) menyatakan bahwa untuk membangun kolaborasi sehingga mencapai kolaborasi tingkat tinggi diperlukan antara lain sistem dan tujuan strategis kolaborasi. Sebagaimana hasil analisis PTA (pada Gambar 4.3 dan 4.4) faktor ini mengakibatkan munculnya faktor *readiness* berupa ketidaksiapan komponen PEL sehingga sebagian komponen tidak tahu harus berbuat apa. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan sinergisme komponen PEL, penyusunan sistem secara komprehensif yang direpresentasikan dalam model sinergisme komponen PEL, sangat disarankan.

Dengan berbagai faktor kendala sebagaimana tersebut di atas, untuk meningkatkan sinergisme komponen PEL, penting dilakukan upaya-upaya sebagai berikut: (1) meningkatkan kapabilitas kolaborasi diantara komponen PEL, (2) melakukan perencanaan kolaboratif, (3)

menyusun sistem kolaborasi yang direpresentasikan dalam bentuk model sinergisme, (4) merumuskan tujuan/sasaran bersama.

Tujuan dan model bermanfaat sebagai acuan bagi setiap komponen untuk berperan dalam PEL berbasis kawasan. Tujuan dan model tersebut juga dapat digunakan sebagai alat bagi setiap komponen yang ingin berkontribusi atau berkolaborasi dalam PEL, tetapi belum mengetahui peran atau kegiatan/program apa yang dapat dilakukan. Model juga dapat digunakan sebagai instrumen bagi Pokja untuk melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap rapat Pokja. Oleh sebab itu, model tersebut harus selalu diperbaharui untuk disesuaikan dengan kondisi aktual dan aspirasi berbagai komponen yang terus berkembang secara dinamis. Hal ini sesuai dengan pandangan Bryson, Crosby, dan Stone (2006, p. 45-52) bahwa struktur kolaboratif perlu disesuaikan dari waktu ke waktu.

Tabel 4.4. Perbandingan Faktor Pemicu Pendorong dan Kendala Sinergisme PEL di Kawasan Telang dan Batu Betumpang

No	Faktor Pemicu Pendorong dan Kendala Sinergisme PEL	
	Telang	Batu Betumpang
1	Kapabilitas kolaborasi (akar masalah)	Kapabilitas kolaborasi (akar masalah)
2	Kepemimpinan	Kepemimpinan
3	Regulasi	Regulasi
4	Sistem Kolaborasi	Sistem Kolaborasi
5	Konsensus Tujuan Bersama	Konsensus Tujuan Bersama
6	Perencanaan Kolaboratif	Perencanaan Kolaboratif
7	Legitimiasi	Legitimiasi
8	Faktor eksternal	Faktor eksternal

Sumber : Rekapitulasi hasil analisis tematik

Agar model dapat memberikan manfaat sebagaimana diharapkan, model memuat tujuan utama dan sasaran klaster yang mengakomodasi kepentingan bersama dan mudah dipahami. Tujuan dan sistem tersebut harus dirumuskan dan disepakati bersama melalui perencanaan kolaboratif agar memperoleh legitimasi. Intervensi yang dilakukan oleh Pemerintah di masing-masing klaster dalam model sinergisme tidak semata-mata berpihak pada masyarakat tetapi juga memberikan fasilitasi agar “pasar” tetap bergairah sehingga ada keseimbangan antara kepentingan masyarakat dengan “pasar”, untuk mencegah terjadinya *disembded economy*; sebagaimana pendapat O’Hara (2012).

Oleh karena beberapa alasan tersebut di atas, Kementerian yang kompeten perlu menyusun regulasi yang mengamahkan perencanaan kolaboratif, tujuan bersama, dan model sistem sinergisme. Penyusunan model dan tujuan bersama, mempertimbangkan faktor eksternal berupa kebijakan masing-masing sektor. Selanjutnya, model dan tujuan bersama yang sudah disepakati melalui perencanaan kolaboratif, ditetapkan sebagai regulasi daerah untuk disosialisasikan kepada seluruh stakeholder sehingga masing-masing komponen memahami perannya. Agar regulasi dapat tersusun dengan baik dan pimpinan memiliki kehandalan dan komitmen untuk membangun sinergisme, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan kapabilitas kolaborasi di kalangan penyusun peraturan dan pemimpin daerah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi pendekatan developmentalis dalam konsep *sosial development* melalui PEL berbasis kawasan dengan skema KTM telah meningkatkan kesejahteraan sosial di kawasan

perdesaan dengan jumlah penduduk miskin relatif tinggi yaitu Telang dan Batu Betumpang. Namun, peningkatan kesejahteraan tersebut belum optimal dan tidak merata, karena kolaborasi komponen PEL belum mencapai kategori sinergisme. Kolaborasi PEL di Kawasan Telang termasuk dalam kategori kolaborasi yang terfragmentasi, diindikasikan oleh empat dimensi sinergisme sebagai berikut: (1) kolaborasi komponen PEL tidak tersistem, (2) tujuan kurang disepakati dan walaupun diinformasikan tetapi umumnya kurang dipahami, (3) komitmen berkontribusi tinggi tetapi komitmen bersinergi kurang, partisipasi bervariasi dari tinggi sampai nihil (4) walaupun PEL sudah memberikan efek positif bagi kesejahteraan tetapi tidak optimal dan belum merata. Penduduk miskin paling miskin belum terjangkau oleh kegiatan yang pesertanya terbatas.

Kolaborasi PEL di Batu Betumpang termasuk dalam kategori kurang sinergis, dengan indikasi sebagai berikut: (1) kolaborasi komponern PEL tersistem tetapi tidak komperhensif dan kurang legitimasi (2) tujuan disepakati dan dipahami oleh sebagian komponen tetapi kurang legitimasi dan belum disepakati dan dipahami oleh komponen lainnya. (3) komitmen pimpinan untuk membangun sinergi relatif tinggi, komitmen Badan Usaha umumnya rendah, dan partisipasi masyarakat bervariasi dari tinggi sampai rendah; (4) PEL sudah memberikan efek positif bagi kesejahteraan tetapi tidak optimal dan belum merata. Penduduk miskin paling miskin belum terjangkau oleh kegiatan yang pesertanya terbatas.

Penelitian ini menemukan bahwa faktor utama yang menjadi pendorong dan kendala sinergisme komponen PEL untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan mencegah terjadinya *disembedded economy* di Kawasan Telang dan Batu Betumpang ialah kapabilitas kolaborasi, kepemimpinan, regulasi, sistem kolaborasi, konsensus tujuan bersama, perencanaan kolaboratif, dan legitimasi. Faktor tersebut secara konsisten menjadi pemicu bagi munculnya faktor lainnya yaitu *readiness*, komitmen bersinergi, keadilan, motivasi, konflik kepentingan, partisipasi masyarakat, kepercayaan, dan komunikasi. Selain itu, juga ada faktor eksternal yang turut memicu munculnya konflik kepentingan. Namun, dampak faktor eksternal akan dapat diminimalkan apabila faktor tersebut sudah dipertimangkan dalam penyusunan model dan tujuan bersama serta ketujuh faktor pemicu dapat diatasi.

Dibanding dengan preposisi (diacu dari McGuire (2006); Bryson, Crosby, dan Stone (2006); Vangen dan Huxham (2003), Kahn dan Mentzer (1996), Kozuch (2009), dan Morris, 2010; McGuire (2006) Bryson, Crosby, dan Morris, 2010; Arnstein (1969); Corning (1983); Hoornbeek, Macomber, Phillips, dan Satpathi (2009), penelitian ini menambah faktor regulasi sebagai salah satu faktor penting yang dapat menjadi pendorong dan kendala sinergisme PEL di kedua kawasan. Selain itu, penelitian ini memberikan informasi bahwa masing-masing faktor-faktor pendorong dan kendala, tidak berpengaruh secara setara terhadap sinergisme tetapi berpengaruh secara terstruktur, terdiri atas faktor pemicu dan faktor terpicu. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan sinergisme PEL dapat dilakukan lebih fokus terhadap faktor pemicunya.

Guna meningkatkan sinergisme PEL (dengan skema KTM) untuk peningkatan kesejahteraan sosial serta mencegah terjadinya *distorted development* dan *disembedded economy* perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut. Pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan kolaboratif untuk merumuskan model kolaborasi yang komprehensif dan tujuan/sasaran bersama. Sesudah model dan tujuan bersama dirumuskan, perlu ditetapkan sebagai regulasi masing-masing daerah dan disosialisasikan kepada stakeholder.

Guna meningkatkan sinergisme PEL pada lokasi baru, disarankan agar faktor *readiness* betul-betul diperhatikan sebelum implementasi PEL dilaksanakan. Caranya dengan

meningkatkan kapabilitas kolaborasi , serta melakukan perencanaan kolaboratif untuk merumuskan model sinergisme yang komprehensif dan tujuan/sasaran bersama. Model yang tersusun, selanjutnya dilegitimasi dalam bentuk regulasi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. (2005). *Ilmu kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. (pengantar pada pengertian dan berbagai pokok bahasan)*. Depok: FISIP UI Press.
- Anderson, Ralph E. & Carter Irl.E. (1974). *Human behavior in social environment. A social systems approach*. Chicago : Aldin Publishing Company.
- Andrushko, Andriy (2012). The reverse synergy: another way of thinking. *International Journal Of Economic Practices And Theories*, Vol. 2, No. 2.
- Argandoña, Antonio. (2004). *Conflicts of interest: the ethical viewpoint*. Working paper, presented at the 13Th International symposium on ethics, business, and society. Barcelona : IESE Business School - University of Navarra.
- Arya, Bagus. (2012). *Tenggelam dalam neoliberalisme? Penetrasi ideologi pasar dalam penanganan kemiskinan*. Depok: Penerbit Kepik.
- Ashari. (2008). Potensi lembaga keuangan mikro dalam pengembangan lembaga ekonomi perdesaan dan kebijakan pengembangannya. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol 2. No 2.
- Bappeda Kabupaten Banyuasin. (2013). *Data program-program sektoral dalam pembangunan KTM Telang Tahun 2009-2013*. Data, tidak dipublikasi.
- Bappeda Kabupaten Banyuasin. (2014). *Data program-program sektoral dalam pembangunan KTM Telang Tahun 2014*. Data, tidak dipublikasi.
- Bappeda Kabupaten Bangka Selatan. (2013). *Data program-program sektoral dalam pembangunan KTM Batu Betumpang Tahun 2009-2013*. Data, tidak dipublikasi.
- Bappeda Kabupaten Bangka Selatan. (2014). *Data program-program sektoral dalam pembangunan KTM Batu Betumpang Tahun 2014*. Data, tidak dipublikasi.
- Badan Pusat Statistik. (2014). *Data kemiskinan dan Pengangguran*. Jakarta : BPS.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin. (2013). *Kabupaten Banyuasin dalam Angka, 2012*. Pangkalan Balai : BPS Kab. Banyuasin.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan. (2013). *Kabupaten Bangka Selatan dalam angka*. Toboali: BPS Kabupaten Bangka Selatan.
- Bahreïn Saeful. (2010). Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat. Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol 8 No 2, p 133-149.
- Baird, Sonya. (2010). *Managing local economic development a case study of tauranga*. Dunedin : University of Otago.
- Baldwin Robert, Martin Cave, Martin Odge. 2013. *Understanding regulation: theory, strategy, and practice*. Newyork: Oxford University Press. 531 P.
- Bank Indonesia Makassar. (2006). *Sinergitas pembiayaan pengembangan UMKM di Sulawesi Selatan*. Dalam buku perkembangan ekonomi dan keuangan daerah. <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/FBB4C5B8-3944-4E2A-82BC-2.pdf>. Diakses tanggal 6 Januari 2012.
- Bappeda Kabupaten Banyuasin. (2011-2013). *Data program-program sektoral dalam pembangunan KTM Telang*. Tidak dipublikasi.

- Batektine, Alex. (2008). Prospective case study design qualitative method for deductive theory testing. *Organizational Research Methods*. Volume 11 (1) January 2008 . P. 160-180. Sage Public Publication.
- Benecke, Gerhard; Willem Schurink; And Gert Roodt. (2007). Towards a substantive theory of synergy. *Journal of Human Resource Management*, 5 (2), 2007, p. 9-19.
- Beyer, Alysha; Claire Peterson & Anita Sharma. (2003). *The role of patispation and partnership in local econominc development in Africa*. Working Paper. New York University's Robert Wagner Graduate Scholl of Public Service.
- Blakely, Edward J. (2010). *Planning local economic development*. California : Sage Publication.
- Bryman , Alan. (2008). *Social research methods. Third edition*. Newyork : Oxford.
- Bryson, John M; Barbara C Crosby; and Melissa Middleton Stone. (2006). The design and implementation of cross-sector collaborations: propositions from the literature. *Jurnal Public Administration Review. Spesial issue edition, Desember 2006*. p 44-55.
- Braun, V. and Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology. Vol 3 (2)*. P 77-101.
- Carnwell, Ros dan Alex Carson. (2005). *The concepts of partnership and collaboration*. In Ros Carnwell and Julian Buchanan (Ed). *Effective Practice in Health and Social Care*. London : Open University Press.
- Corbin, J. Hope, Maurice B. Mittelmark, & Gro Th. Lie. (2011). *Mapping synergy and antagony in north-south partnerships for health: a case study department of health promotion and development*. Bergen: Faculty of Psychology, University of Bergen. Bora-UiB.
- Corning, Peter A. (1998).the synergism hypothesis. On the concept of synergy and it's role in the evolution of complex systems. *Journal Of Social And Evolutionary Systems*, Vol 21 No 2.
- Corwin, J. Lise, Hope Corbin, & Maurice B. Mittelmark. (2012). Producing synergy in collaborations: a successful hospital innovation. *The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal*, Volume 17(1), 2012, p.1-17.
- Creswell, John W. (2009). *Research design. Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Edisi Ketiga. Terjemah Ahmad Fawaid. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Darmanto, Didik. (2011). *Sinergi antar instansi pemerintah dalam implementasi kebijakan kewirausahaan pemuda di Provinsi Yogyakarta*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Darwis V. & Rusastra I.W. (2011). Optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa melalui sinergi program puap dengan desa mandiri pangan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* Vol 9 No 2 , p 125-142.
- Danarti. (2012). *Pengembangan kewirausahaan di Kota Terpadu Mandiri Telang*. Jakarta: Puslitbang Ketransmigrasian.
- DFID. (1999). *Sustainable livelihoods guidance sheets*. London: Department For International Development.
- Disnakertrans Kabupaten Banyuasin. 2013. *Laporan perkembangan pembangunan KTM Telang Kabupaten Banyuasin*. Banyuasin : Disnakertrans.
- Disnakertrans Kabupaten Banyuasin. (2014). Program pembangunan KTM Telang Tahun 2014. Data, tidak dipublikasi.
- Disosnakertrans Kabupaten Bangka Selatan. (2014). Program pembangunan KTM Batu Betumpang. Tahun 2009-2014. Data, tidak dipublikasi.
- Erizal, Jamal. (2008). Kajian kritis terhadap pelaksanaan program pembangunan perdesaan di Indonesia. *Jurnal Forum Penelitian Agroekonomi*. Vol 26 No 2 , p 92-102.

- Friedlander, Walter A. (1968). *Introduction to social welfare*. Third Edition. New Jersey : Prentice-Hall, Inc.
- Gibsons, Stephen & Sibhan Hugh-Jones. 2012. *Analisis your data*. In *Doing your qualitative psychology project*. Cath Sullivan, Stephen Gibson, Sarah C.E. Riley. (ed). London : Sage Publication. 219.p
- Gilgun, Jane F. (2014). *Deductive qualitative analysis and grounded theory*. Chicago : Chicago School Traditions. P. 2002.
- Goldman. (2005). *A framework for monitoring and evaluation of pro-poor local economic development*. Netherlands: World Bank-Netherlands Partnership Program (BNPP).
- Golonka, Monika. (2013). External factors influencing interorganizational collaboration: the strategic perspective. *Management and Business Administration*, Vol. 22 (3, 122), 2013, p. 15–29.
- Haryadi dkk. (2012). *Evaluasi perkembangan KTM Batu Betumpang*. Tidak dipublikasi.
- Hall, Kara L. at al. 2008 The collaboration readiness of transdisciplinary research teams and centers. *American Journal of Preventive Medicine*, 2008 : Volume 35, Number 2S. P 161-172.
- Hassan, Ahmed. (2003). *A Validation process for the groundwater flow and transport model of the faultless nuclear test at Central Nevada Test*. Las Vegas: Nevada Site Office National Nuclear Security Administration U.S. Department of Energy. p.76.
- Healey, Patsy. (1998). Building institutional capacity through collaborative approaches to urban planning. *Environment and Planning A* 30(5): 1531–56.
- Healey, Patsy. (2006). *Collaborative Planning, Shaping Places in Fragmented Societies*. 2nd. New York: Palgrave Macmillan.
- Helmsing, A.H.J. (Bert). (2001). *Local economic development new generations of actors, policies and instruments. A summary report prepared for the uncdf symposium on decentralization local governance in africa*. Papers for the 2001 Cape Town Symposium.
- Hoornbeek John, Kerry Macomber, Melissa Phillips, & Sayantani Satpathi. (2009). *Local government collaboration in ohio: are we walking the walk or just talking the talk?*. Kent Ohio : The Center for Public Administration and Public Policy, Kent State University (KSU). P.32
- Ife, Jim & Frank Tesoriero. (2008). *Community development, community base alternatif in on age of globalisation*. Frenchs Forest, N.S.W: Pearson Education Australia.
- Iqbal, Muhammmad & Iwan Setiajie Angugrah. (2009). Rancang bangun sinergi kebijakan agropolitan dengan pengembangan ekonomi lokal menunjang pembangunan wilayah. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. Vol 7 No 2. P 169-188.
- Jocom, Sherly Gladys. (2006). *Analisis dampak dan strategi pengembangan agropolitan basis jagung terhadap perekonomian wilayah serta analisis pendapatan masyarakat petani di Provinsi Gorontalo (studi kasus kabupaten pohuwato)*. Tesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Kahn dan Mentzer. (1996). Logistic and interdepartemental integration. *Internasional journal of physical distribution & logistics managemenet*. Vol 26, Iss:8, p. 6-14.
- Keputusan Bupati Bangka Selatan No 188.45/1478.A/DSTKT/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bangka Selatan No 188.45/177/Disnakertrans/2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan dan Pengembangan KTM Batu Betumpang Kabupaten Bangka Selatan.
- Keputusan Bupati Bangka selatan No 188.45/3/BP3MD/2009 tentang Penetapan Kawasan KTM Batu Betumpang.
- Keputusan Bupati Bangka Selatan No 188.45/01/DSTKT/2014 tentang Pembangunan dan Pengembangan KTM Batu Betumpang Kabupaten Bangka Selatan.

- Keputusan Bupati Bangka Selatan No 9a tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Kawasan Kota Terpadu Mandiri Batu Betumpang.
- Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 227 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Telang Kabupaten Banyuasin.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Kep. 124/Men/V/2007 tentang *Pedoman Umum Pembangunan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi*.
- Konikow, L. F., & Bredehoeft, J. D., (1992), Ground-water models cannot be validated: *Advances in Water Resources J*, vol 15, 1992, p. 75-83.
- Kozuch, Barbara. (2009). The culture of collaboration. Theoretical aspects. *Journal of Intercultural Management*, 1 (2), p. 17–29.
- Laksmono, Bambang Shergi. (1999). *Permasalahan akses dalam program penanggulangan kemiskinan, kajian kelembagaan dalam pelaksanaan program IDT di Wilayah DKI Jakarta pada tahun pelaksanaan 1994-95*. Jakarta : Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
- Lasker, R.D., Eliza S. Weiss, & Rebecca Miller. (2001). *Partnership synergy: a practical framework for studying and strengthening the collaborative practice and research.* Malden : Blackwell Publisher.
- McGuire, Michael. (2006). *Collaborative public management: assessing what we know and how we know it. Jurnal public administration review. Spesial issue edition*, Desember 2006. p 33-42.
- Midgley, James. (1995). *Social development. The development perspective in social welfare*. London : Sage Publication.
- Mikkelsen, Britha. (1999). *Metode penelitian partisipatoris dan upaya-upaya pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Middleton, Tom. (2011). *Local economic development: researching cluster in Woodford Country Centucki*. Kentucky : University of Kentucky.
- Mittman, Brian S. (2001). *Qualitative methods and rigorous management research: (how) are they compatible?*. California: Management Decision and Research Center.
- Morris, Marleen. (2010). *Multi-sectoral collaboration and economic development: lessons from england's regional development agencies*. Canada : UNBC, Prince George, BC.
- Najiyati, Sri & Slamet RTS. (2011). Sinergitas instansi pemerintah dalam pembangunan Kota Terpadu Mandiri. *Jurnal Ketransmigrasian* Vol. 28 No. 2, Desember, 2011, p 113-124.
- Namey, Emily; Greg Guest; Lucy Thairu & Laura Ajohnson.(2008). Data Reduction Techniques for Large Qualitative Data Sets. In Handbook for Team-based Qualitative Research. Greg Guest & Kathleen M. MacQuee (Ed). United Kingdom : Altamira Press. P. 292.
- Nemes, Gusztáv. (2005). *Integrated rural development: the concept and its operation*. Budapest : Institute of Economics Hungarian Academy of Sciences.
- Nugroho, Agus Eko, Latif Adam, Endang Tjitroresmi, dan Bagus Aryo. (2010). *Analisis permasalahan kemiskinan*. Dalam buku program anti kemiskinan reproduksi modal sosial, studi kasus PNPM Mandiri Perdesaan. Agus Eko Nugroho (Ed). Jakarta : LIPI Press.
- OECD.2010. *Regulatory Policy and the Road to Sustainable Growth*. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). <http://www.oecd.org/regreform/policyconference/46270065.pdf>. Diakses tanggal 1 November 2014.
- O'Hara, Phillip Anthony. (2012). Principles of political economy applied to policy and governance: disembedded economy, contradictions, circular cumulation and uneven development. *Journal of Economic and Social Policy* Volume 15 | Issue 1 Article 1, 2012.
- O'Leary, R., Gazley, B. McGuire M, & Bingham L.B (2009). *Blomgreen. Public Managers in Collaboration. In The Collaborative Public Manager: New Ideas For The Twenty-First*

- Century*.(O'Leary R. Bingham,L.B ed) Washiongton, D.C. Georgetown: University. Press. In Zhang Nan and Lu Zhikui.
- Peraturan Presiden R.I.No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2010-2014). Jakarta : Bappenas.
- Perry, Chad & Oystein Jensen. (2001). *Approaches to combining induction and deduction in one research study. Proceeding of the Australian and New Zealand Marketing Academi Conference, 1-5 Desember 2001*. Lismore: Southern Cross University.
- Reid, Neil & Bruce W. Smith. (2012). Collaboration in Local Economic Development: the case of Toledo. *Urbani Izziv*, volume 23, supplement 1, 2012 (special issue).
- Ribot, Jesse C. and Nancy Lee Peluso. (2003), A theory of access. *Rural Sociology Society*. Vol 68 (2): p 153–181.
- Richard, Jeffrey A. (2007). *The principles of synergism: radical empowerment*. Oxford USA: Trafford.
- Rogerson, Christian M. (2002). *Pro-poor interventions for local economic development: the case for sectoral targeting*. Johannesburg : University of the Witwatersrand.
- Rosas, João Almeida Das. (2009). *Assessing organizations collaboration readiness a behavioral approach*. Lisboa: Dissertation at the Faculty of Sciences and Technology of the New University of Lisbon. P225.
- Scoones, Ian. (1998). *Sustainable Rural Livelihoods: A Framework for Analysis'*, Working Paper 72. Brighton. UK: Institute for Development Studies.
- Silverman, David. (2011). *Interpreting qualitative data: methods for analysing qualitative data*. London: Sage. p. 448.
- Soekidjan. (2009). *Manajemen Sumberdaya Manusia* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Soelaiman, Holil. (1980). *Partisipasi sosial dalam usaha kesejahteraan sosial*. Bandung: Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.
- Suyanto, Yulistywelcho. (2000). *Peningkatan daya saing produk agribisnis unggulan di Kabupaten Semarang*. Semarang : Program Studi Magister Agribisnis. Program Pasca Sarjana, Undip.
- Sugarmansyah, Ugay dkk. (2011). *Panduan pengembangan cluster industri*. Jakarta : Pusat Pengkajian Kebijakan Inovasi Teknologi Deputy Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
- Syukri, Muhammad, Sulton Mawardi, dan Akhmadi. (2011). *Studi kualitatif dampak PNPM-Perdesaan Tahun 2010 di Provinsi Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sulawesi Tenggara*. Jakarta : Lembaga Peneltian SMERU.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Widya Pustaka Utama.
- Swinburn Gwen, Soraya Goga & Fergus Murphy. (2006). *Local economic development: a primer developing and implementing local economic development strategies and action plans*. Washington, D.C.: The World Bank, Bertelsmann Stiftung, Cities Of Change.
- Tarigan. (2004). *Perencanaan pembangunan wilayah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Tello, Mario D. (2010). From national to local economic development: theoretical issues. *Cepal Review* Vol 102, December 2010. Economics Department, Catholic University of Peru.
- The World Bank. (2011). *Local Economic Development*. The World Bank. <http://www.worldbank.org>. Diakses Tanggal 20 Pebruari 2013.
- Vangen, Siv & Chris Huxham. (2003). *Enacting leadership for collaborative advantage : dilemmas of ideology and pragmatism in the activities of partnership managers*. Britis Journal of Management, Vol 14, S 61-S76 (2003).

- Wanna, John. (2008). *Collaborative government: meanings, dimensions, drivers and outcomes*. In Janine O'Flynn and John Wanna (Ed). Collaborative governance, a new era of public policy in Australia). Canberra : ANU E-Press, The Australia Nasional University.
- Yunelimeta. (2008). *Pembangunan pedesaan dalam konteks agropolitan, desentralisasi, dan otonomi daerah di indonesia studi kasus Daerah Minangkabau-Sumatera Barat*. Semarang : Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota, Undip.
- Zastrow, Charles. (2010). *Introduction to social work and sosial welfare. Empowering people*. Belmont : Brooks/Cole.